

BUKU I

RENCANA INDUK SMART CITY KABUPATEN ACEH TENGAH



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
1. Analisis Masa Depan	1
1.1 Kondisi Umum Daerah.....	1
1.1.1 Profil Kabupaten Aceh Tengah.....	1
1.1.2 Aspek Geografis	2
1.1.3 Penggunaan Lahan.....	6
1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah.....	7
1.1.5 Wilayah Rawan Bencana	9
1.2 Isu Strategis	11
1.3 Analisis Tren dan Perkembangan Daerah.....	12
1.4 Analisis Data Saing Daerah	13
2. Analisis Kesiapan Daerah	13
2.1 Struktur.....	13
2.1.1 Sumber Daya Manusia.....	13
2.1.2 Sumber Daya Pemerintah	16
2.1.3 Kapasitas Keuangan Daerah	18
2.2 Infrastruktur.....	21
2.2.1 Infrastruktur Fisik.....	21
2.2.2 Infrastruktur Digital.....	23
2.2.3 Infrastruktur Sosial	24
2.3 Superstruktur	26
2.3.1 Kesiapan Kebijakan Daerah.....	26
2.3.2 Kesiapan Lembaga Daerah	27
2.3.3 Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah.....	27
3. Analisis Kesenjangan.....	29
3.1 Analisis Kesenjangan <i>Smart Governance</i>	29
3.2 Analisis Kesenjangan <i>Smart Branding</i>	33
3.3 Analisis Kesenjangan <i>Smart Economy</i>	36
3.4 Analisis Kesenjangan <i>Smart Living</i>	42

3.5	Analisis Kesenjangan <i>Smart Society</i>	45
3.6	Analisis Kesenjangan <i>Smart Environment</i>	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Isu Strategis Kabupaten Aceh Tengah	11
Tabel 2. Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	14
Tabel 3. Analisis Kualitas SDM Daerah	14
Tabel 4. Nama Ibukota Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah	16
Tabel 5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Tengah.....	17
Tabel 6. Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah	17
Tabel 7. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.....	19
Tabel 8. Analisis Kapasitas Keuangan Daerah.....	20
Tabel 9. Banyaknya Sarana Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Aceh Tengah.....	21
Tabel 10. Daftar Pasar Tradisional Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah	22
Tabel 11. Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah	22
Tabel 12. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	24
Tabel 13. Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah	24
Tabel 14. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah	25
Tabel 15. Ketersediaan Fasilitas Kegiatan Belajar dan Perpustakaan Kabupaten Aceh Tengah	25
Tabel 16. Ketersediaan Kebijakan Daerah dalam mendukung TIK Kabupaten Aceh Tengah	26
Tabel 17. Ketersediaan organisasi dan kegiatan pendukung smart city Kabupaten Aceh Tengah	28
Tabel 18. Analisis Kesenjangan Smart Governance	29
Tabel 19. Analisis Kesenjangan Smart Branding	33
Tabel 20. Analisis Kesenjangan Smart Economy	36
Tabel 21. Analisis Kesenjangan Smart Living	42
Tabel 22. Analisis Kesenjangan Smart Society.....	45
Tabel 23. Analisis Kesenjangan Smart Environment.....	48
Tabel 24. Penjelasan Visi Kabupaten Aceh Tengah.....	52
Tabel 25. Misi Kabupaten Aceh Tengah	53
Tabel 26. Penjelasan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Aceh Tengah	54
Tabel 27. Tema Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah.....	57
Tabel 28. Arah Kebijakan Kabupaten Aceh Tengah.....	57
Tabel 29. Keterkaitan Misi RPJM Kabupaten Aceh Tengah dengan RPJM Provinsi Aceh	59
Tabel 30. Rumusan misi Smart City Kabupaten Aceh Tengah.....	60
Tabel 31. Kesesuaian Misi Smart City Kabupaten Aceh Tengah Misi RPJMD Kabupaten Aceh Tengah.....	60
Tabel 32. Sinkronisasi Strategi kebijakan RPJMD Kabupaten Aceh Tahun 2017 – 2022 dengan Dimensi Smart City.....	62
Tabel 33. Sinkronisasi Tujuan dan Indikator Kinerja Utama RPJMD dengan Dimensi Smart City	68
Tabel 34. Sinkronisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah dengan Pengembangan Smart City Kabupaten Aceh Tengah.....	71

Tabel 35. Strategi Pembangunan Smart Governance	76
Tabel 36. Strategi Pembangunan Smart Branding.....	77
Tabel 37. Strategi Pembangunan Smart Economy	79
Tabel 38. Strategi Pembangunan Smart Living.....	80
Tabel 39. Strategi Pembangunan Smart Society	81
Tabel 40. Strategi Pembangunan Smart Environment.....	82

1. Analisis Masa Depan

1.1 Kondisi Umum Daerah

1.1.1 Profil Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah secara resmi dikukuhkan pada tahun 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956, tepatnya 11 tahun setelah Negara Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Meskipun demikian, wilayah Aceh Tengah sebenarnya telah berkembang sejak zaman Belanda (tahun 1904-1942). Pada zaman itu wilayah Takengon (Onder Afdeeling Nordhus Atjeh) menetapkan Sigli sebagai ibukotanya. Onder Afdeeling Takengon yang ibu negeri Takengon pada saat itu terdiri atas empat negeri (Landschap) yaitu: (1) Landschap Bukit dengan ibukotanya Mampak, (2) Landschap Linge dengan ibukotanya Isaq, (3) Landschap Syiah Utama dengan ibukotanya Nosar, dan (4) Landschap Cik dengan ibukotanya Kemili.

Berakhirnya masa pendudukan Belanda berlanjut dengan masa pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942-1945. Pada masa ini, pembagian wilayah tidak berubah sebagaimana masa pendudukan Belanda. Jepang hanya mengganti istilah-istilah Belanda seperti (1) Onder Afdeeling menjadi Gun, yang dipimpin oleh pribumi yang disebut dengan Gunco, (2) Landschap diubah menjadi Sun yang dipimpin oleh pribumi yang disebut dengan Sunco. Setelah Indonesia merdeka, istilah Gun dan Sun diubah kembali dengan sebutan wilayah, yang kemudian diubah kembali dengan nama kabupaten yang terdiri atas beberapa Kewedanaan. Sun diubah menjadi negeri yang kemudian diganti lagi dengan sebutan kecamatan. Perubahan-perubahan tersebut membagikan wilayah administratif Aceh Tengah ke dalam tiga kewedanaan, yaitu Kewedanaan Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas.

Pada masa kemerdekaan, dinamika kehidupan masyarakat semakin berkembang dan hubungan antar wilayah menjadi semakin meningkat. Hubungan antar wilayah atau antar kewedanaan ditempuh melalui lintas Sumatera Utara. Prasarana dan sarana transportasi yang ada masih sangat sulit. Kesulitan-kesulitan ini akhirnya memekarkan Kabupaten Aceh Tengah menjadi dua bagian pada tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974. Pemekaran tersebut menetapkan Kewedanaan Gayo Lues dan Tanah Alas sebagai wilayah pemerintahan baru, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara. Kewedanaan Takengon (Kabupaten Aceh Tengah) pada masa itu melingkupi tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Kota, Bukit,

Bebesen, Timang Gajah, Silih Nara, Linge, dan Bandar, ditambah dengan dua perwakilan Kecamatan, yakni Pegasing dan Bintang. Luasnya wilayah kecamatan yang ada dan jarak rentang kendali beberapa kecamatan, telah menuntun pemekaran Kecamatan Silih Nara dan Kecamatan Bandar masing-masing Kecamatan Syiah Utama dengan ibukotanya Rusip dan Kecamatan Ketol dengan ibukotanya Rejewali (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2000).

Selanjutnya, pada tahun 2004 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan kembali sehingga menambah sebuah kabupaten baru, yaitu Kabupaten Bener Meriah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dengan ibukotanya Redelong yang terbagi dalam tujuh kecamatan.

1.1.2 Aspek Geografis

1.1.2.1 Kondisi Geografis, Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Aceh Tengah terletak antara $40^{\circ}10'33''$ sampai $50^{\circ}57'50''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}15'40''$ sampai $97^{\circ}20'25''$ Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.318,39 km² dengan ketinggian antara 200 meter sampai dengan 2.600 meter diatas permukaan laut (dpl), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Bener Meriah;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Gayo Lues;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur; dan
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie dan Aceh Barat.

Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Aceh Tengah terbagi atas 14 kecamatan, 20 kemukiman dengan jumlah kampung definitif sebanyak 295 dan 58 kampung persiapan.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Bakosurtanal skala 1:50.000, posisi astronomis Kabupaten Aceh Tengah terletak pada $40^{\circ}22'14,42''$ – $40^{\circ}42'40,8''$ LU dan $96^{\circ}15'23,6''$ – $97^{\circ}22'10,76''$ BT. Dengan posisi tersebut seperti wilayah Indonesia pada umumnya, Kabupaten Aceh Tengah juga berada di kawasan iklim tropis, hal ini membuat Kabupaten Aceh Tengah selalu disinari matahari sepanjang tahun dengan memiliki dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Dari sisi perbedaan waktu, Kabupaten Aceh Tengah termasuk dalam daerah waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

Ditinjau dari aspek posisi geostrategic, Kabupaten Aceh Tengah termasuk salah satu daerah dataran tinggi di Aceh dan merupakan bagian punggung pegunungan

bukit barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Disamping itu, Kabupaten Aceh Tengah memiliki suhu udara yang relatif sejuk. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Aceh Tengah berpotensi menjadi daerah wisata alam ditambah kehadiran Danau Laut Tawar yang indah dikelilingi oleh perbukitan yang ditumbuhi pohon Pinus Merkusi. Disamping itu, Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah agraris dengan komoditi seperti; andalan kopi arabika, kentang, tomat, alpukat, jeruk keprok dan cabai.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki aksesibilitas yang relatif baik sehingga akses kesemua kampung dapat dijangkau. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Aceh Tengah tidak memiliki daerah pedalaman. Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi Gayo dengan topografi wilayah bergunung dan bukit, banyak gunung yang tersebar terhampar di wilayah Aceh Tengah, diantaranya Burni Klieten.

1.1.2.2 Topografi, Geologi, hidrologi dan klimatologi

Kabupaten Aceh Tengah memiliki karakteristik topografi yang beragam, berbentuk datar, landai sampai bergunung. Bentuk wilayah yang berbukit mendominasi topografi Aceh Tengah. Klasifikasi kelerengannya berturut-turut <8 persen, 8-15 persen, 16-25 persen, 26-40 persen, dan >40 persen. Berdasarkan kelompok kelerengan tersebut lahan dengan kelerengan 25 -40 persen mendominasi wilayah Aceh Tengah dengan luasan 184.932,46 Ha atau sebesar 41,52 persen dari total luas wilayah kabupaten.

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki ketinggian di atas permukaan laut mulai dari 100 m dpl hingga lebih 2.000 m dpl. Daerah dengan ketinggian antara 1.500 – 1.750 m dpl mendominasi wilayah Aceh Tengah dengan persentase sebesar 24,18 % dari luas wilayah kabupaten. Daerah dengan kisaran ketinggian tersebut harus dilindungi oleh tegakan pohon, hal ini dimaksudkan agar berfungsi sebagai pelindung hidrologis dan menjaga keseimbangan ekosistem sehingga bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor dapat terminimalisasi.

Struktur geologi yang berkembang di wilayah Kabupaten Aceh Tengah berupa lipatan-lipatan yang membentuk sinklin dan antiklin serta sesar-sesar (patahan). Arah sesar kurang

lebih berarah barat laut - tenggara dan utara - selatan. Sedangkan antiklin mempunyai arah kurang lebih barat – timur.

Secara umum jenis tanah di Kabupaten Aceh hampir mewakili jenis di Indonesia yang terdiri atas grumosol, podzolik, rendzina, andosol, mediteran, latosol dan alluvial. Jenis tanah salah satu faktor yang berhubungan dengan karakteristik tanaman yang tumbuh disamping faktor lingkungan lainnya. Jenis tanah podzolic yang merupakan salah satu jenis tanah yang banyak dijumpai, memiliki daya dukung yang tinggi untuk digunakan sebagai lahan pertanian khususnya pertanian lahan basah.

Arah dan pola aliran sungai dan melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama, yaitu ; Sungai-sungai yang mengalir ke Samudera Hindia atau ke arah barat dan Sungai-sungai yang mengalir ke Selat Malaka atau ke arah timur. DAS yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah antara lain:

- DAS Jambo Aye seluas 193.924,37 Ha;
- DAS Woyla seluas 53.236,86 Ha;
- DAS Peusangan seluas 127.452,79 Ha;
- DAS Meureubo seluas 52.865,53 Ha;
- DAS Tripa seluas 14.955,02 Ha;
- DAS Tamiang Langsa seluas 5.317,28 Ha;
- DAS Seunagan seluas 4.941,07 Ha dan
- DAS Peudada seluas 60,48 Ha.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki 3 danau dan yang terbesar adalah danau Laut Tawar dengan luas 5,742.10 ha terletak di sebelah Timur Kawasan Perkotaan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, dimana daerah tangkapan Danau Laut Tawar secara administratif masuk kedalam wilayah Kecamatan Lut Tawar, Kebayakan, Bebesen dan Kecamatan Bintang.

Danau Laut Tawar memiliki aliran masuk (inlet) sebanyak 17 sungai dan anak sungai dengan besar debit air masuk bervariasi antara 0.04–1.44 m³/detik dengan debit total sebesar 8.80 m³/detik. Danau ini memiliki satu aliran keluar (outlet) yaitu Sungai Peusangan dengan debit aliran sebesar 29.02 m³/detik (Iriadi 2015). Besar debit aliran keluar tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah melalui kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Kreung Peusangan 1 dan 2 dengan kapasitas 84.6 MW yang ditargetkan beroperasi di tahun 2019.

Selain untuk energi dan pariwisata, danau ini berperan penting dalam pengendalian keseimbangan air khususnya Perkotaan Takengon dan menjadi sumber air untuk Kabupaten Bener Meriah, Bireuen, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Air danau terutama dimanfaatkan untuk air minum dan budidaya perikanan air tawar sebagai mata pencaharian bagi para nelayan yang tinggal di sekitar danau. Berdasarkan pengamatan terakhir, kondisi Danau Laut Tawar kini sudah mengalami degradasi, yang dicirikan oleh semakin berkurangnya debit air Danau Laut Tawar dan tingginya sedimentasi yang terjadi di Danau Laut Tawar. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya tutupan lahan di sekitar Danau Laut Tawar dikarenakan alih fungsi lahan dari hutan menjadi areal perkebunan. Sementara di perairan danau, terjadi penurunan luasan perairan yang disebabkan oleh pemanfaatan lahan sempadan dan zona litoral danau untuk perluasan tempat wisata dan permukiman penduduk.

Laju eksploitasi ikan di Danau Laut Tawar yang semakin tinggi yang berlangsung setiap hari dan ditambah pula kerusakan ekosistem danau terutama di Kawasan pinggiran danau dan sumber-sumber air danau menyebabkan terhambat dan berkurangnya populasi ikan khususnya ikan depik. Menurut Muchlisin (2010), hasil upaya tangkapan ikan depik per unit (*Catch Per Unit Effort*) pada tahun 1970 sebesar 1.17 kg/m² jaring dan menurun menjadi 0.02 kg/m² jaring di tahun 2009. Selain laju eksploitasi ikan yang tinggi (Hasri, at al. 2011), penyebab penurunan ikan depik lainnya adalah pencemaran perairan Danau Laut Tawar yang semakin hari semakin meningkat. Menurut Iriadi (2015) sedikitnya ada empat sumber bahan pencemar perairan danau antara lain; permukiman penduduk, pertanian, pariwisata dan Keramba Jaring Apung (KJA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber tertinggi berasal dari permukiman penduduk sebesar 58,40% disusul dengan pertanian (23,52%), pariwisata (17,75%) dan KJA (0,33%).

Sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, hasil analisis STORET menunjukkan bahwa status mutu air Danau Laut Tawar berada pada Kelas C atau “cemar sedang” dan Kelas B atau “cemar ringan”. Parameter yang menyebabkan mutu air danau tercemar (menggunakan mutu air kelas I), antara lain DO dengan skor (-2), COD (-10), TP (-2), timbal (-2). Parameter yang

menyebabkan mutu air danau tercemar (menggunakan mutu air kelas II), antara lain TP (-2) dan timbal (-2), sedangkan parameter yang menyebabkan mutu air danau tercemar (menggunakan mutu air kelas III) adalah timbal (-2).

Dari sudut pandang ekonomi, empat sumber limbah tersebut memiliki potensi Nilai Ekonomi (NE) yang berbeda. Keramba jaring apung dengan luasan sebesar 0.31 ha memiliki potensi NE tertinggi (Rp.36.397.782.015/ha/tahun) dibandingkan dengan yang lainnya. Namun aktivitas tersebut berpotensi sebagai penyumbang Beban Pencemaran (BP) terbesar khususnya parameter TN dan TP (40,17 ton/ha/tahun), sedangkan aktivitas pertanian memiliki potensi NE dan BP terendah (Rp.894.598.072/ha/tahun dan 0,07 ton/ha/tahun) (Iriadi 2015).

Disisi lain, pemanfaatan ruang perairan Danau Laut Tawar cukup beragam dan menimbulkan masalah tersendiri. Tiap sektor pemanfaatan danau membutuhkan kriteria kualitas air dan lingkungan yang berbeda. Aktivitas KJA sangat tidak mendukung pariwisata yang berbasis perairan, baik dari sisi kualitas air maupun dari sisi kenyamanan lingkungan. Begitu juga aktivitas transportasi perairan danau yang terus berkembang dapat mengganggu wilayah zonasi kawasan konservasi (Nasution 2015). Wilayah Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang beriklim tropis, tergolong pada iklim tipe B menurut Schmidt Ferguson dengan curah hujan berkisar antara 2603 - 3725 mm/tahun. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli, dan musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki kelembaban udara dengan rata-rata 80,08 persen. Kelembaban udara tertinggi 86,28 persen dan terendah 74,25 persen. Kecepatan angin tertinggi 2,53 m/det dan terendah 0,95 m/det.

1.1.3 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Tengah secara garis besar dibagi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Luas kawasan lindung Kabupaten Aceh Tengah sebesar 62,76 persen dan kawasan budidaya sebesar 37,24 persen. Penggunaan dan pengembangan wilayah di kabupaten Aceh Tengah meliputi beberapa kawasan antara lain:

- Kawasan lindung dengan luas penggunaan lahan berdasarkan rencana pola ruang adalah 284.146,86 (Ha)
- Kawasan budi daya dengan luas penggunaan lahan 168.606,59 (Ha)

1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Aceh memiliki wilayah strategis nasional, regional dan daerah. Oleh karena itu dalam pengembangan wilayah harus memperhatikan lingkungan strategis sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang Kabupaten Aceh Tengah merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan dan perdesaan. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan kabupaten Aceh Tengah secara keseluruhan.

Rencana struktur ruang yang dikembangkan di Kabupaten Aceh Tengah meliputi empat struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem dan jaringan utilitas perkotaan. Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem pusat kegiatan primer dan sekunder. Sistem dan jaringan transportasi terdiri dari sistem dan jaringan transportasi darat, selanjutnya sistem prasarana sumber daya air terdiri dari sistem konservasi sumber daya air, sistem pendayagunaan sumber daya air, dan sistem pengendalian daya rusak air.

Sedangkan sistem dan jaringan utilitas perkotaan terdiri atas sistem dan jaringan air bersih, sistem prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, sistem prasarana dan sarana pengelolaan sampah, sistem dan jaringan energi, serta sistem dan jaringan telekomunikasi. Pola struktur ruang yang dibentuk berdasarkan sistem pusat kegiatan dan pusat pelayanan di Kabupaten Aceh Tengah adalah:

1. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)

PKW yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Aceh Tengah adalah PKW Takengon, yang dibentuk untuk melayani Provinsi Aceh bagian tengah. PKW Takengon merupakan kumpulan kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di Kecamatan Kebayakan, Lut tawar dan Bebesen.

2. PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi)

PKLp yang ditetapkan adalah:

- PKLp Isaq di Kecamatan Linge, mempunyai jangkauan pelayanan paling tidak mencakup Kecamatan Linge.
- PKLp Angkup di Kecamatan Silih Nara, mempunyai jangkauan pelayanan paling tidak mencakup Kecamatan Silih Nara, Celala, Kute Panang, Ketol dan Rusip Antara.
- PKLp Jeget Ayu di Kecamatan Jagong Jeget, mempunyai jangkauan pelayanan paling tidak mencakup Kecamatan Jagong Jeget dan Atu Lintang.

3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)

PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang ditetapkan adalah:

- PPK Simpang Kelaping, di Kecamatan Pegasing.
- PPK Rejewali, di Kecamatan Ketol.
- PPK Wakil Jalil, di Kecamatan Bintang.
- PPK Ratawali, di Kecamatan Kute Panang.
- PPK Berawang Gading, di Kecamatan Celala.
- PPK Pantan Tengah, di Kecamatan Rusip Antara.
- PPK Atang Jungket, di Kecamatan Bies.
- PPK Merah Mege, di Kecamatan Atu Lintang.

4. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)

Kriteria PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa desa di luar kawasan perkotaan. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Aceh Tengah merupakan pusat mukim yang tersebar di seluruh kecamatan di luar kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang ditetapkan adalah:

- PPL Simpang III Uning di Kecamatan Linge.
- PPL Waq di Kecamatan Linge.
- PPL Mude Nosar di Kecamatan Bintang.
- PPL Paya Tampu di Kecamatan Rusip Antara.

1.1.5 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah terdapat beberapa kawasan rawan bencana alam seperti :

- Kawasan rawan bencana banjir
- Kawasan rawan bencana sesar
- Kawasan rawan bencana gerakan tanah
- Kawasan rawan bencana gunung berapi

Bencana banjir di Kabupaten Aceh Tengah selain dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menyebabkan kerugian material, juga telah menyebabkan korban jiwa. Banjir terutama terjadi di daerah hilir sungai yang merupakan akibat dari berkurangnya daerah resapan dan rusaknya fungsi lindung di daerah hulu. Banjir dapat terjadi selama atau setelah hujan lebat. Air hujan yang masuk ke dalam sungai, apabila melebihi daya tampung sungai, maka air akan meluap dan mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Aktivitas manusia sering pula menimbulkan banjir seperti membuang sampah ke sungai, mendirikan perumahan pada bantaran sungai, penebangan pohon secara liar dan pembangunan perumahan di daerah resapan air. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tengah meliputi Kampung Rawe dan Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar dengan luas 93,48 Ha.

Sesar merupakan struktur geologi berupa rekahan yang telah mengalami pergeseran sehingga menimbulkan gejala-gejala bencana alam geologi seperti adanya zona lemah atau zona breksiasi (zona hancuran) yang rentan terhadap terjadinya longsor. Adapun daerah-daerah yang menjadi kawasan bencana sesar memiliki luas 2.707,47 Ha di Kabupaten Aceh Tengah meliputi:

1. Kecamatan Linge seluas 866,62 Ha, meliputi Kampung Kute Robel, Kute Baru, Ise Ise dan Kampung Arul Item.
2. Kecamatan Jagong Jeget seluas 293,78 Ha, meliputi Kampung Paya Dedep dan Kampung Jeget Ayu.
3. Kecamatan Pegasing 389,67 Ha, meliputi Kampung Lelumu, Wih Lah, Wih Ilang dan Kampung Jejem.
4. Kecamatan Atu Lintang seluas 208,66 Ha, meliputi Kampung Despot Linge dan Pantan Musara.

5. Kecamatan Rusip Antara 1.396,76 Ha, meliputi Kampung Termiara, Kerawang, Lut Jaya, Berawang Polim, Kuala Rawa, Tanjung, Merandeh Paya, Paya Tampu dan Pilar Jaya.
6. Kecamatan Celala 418,6 Ha, meliputi Kampung Paya Kolak dan Alur Gading

Peristiwa bencana gerakan tanah (tanah longsor) di Kabupaten Aceh Tengah juga harus diwaspadai karena didukung oleh berbagai faktor seperti bentuk topografi yang relatif curam, kondisi geologi yang bervariasi dengan struktur geologi yang berkembang cukup intensif dan curah hujan yang tinggi. Penyebabnya selain faktor-faktor alamiah juga disebabkan ulah manusia seperti penebang pohon secara liar, pemotongan lereng dan penggalian bahan tambang tanpa memperhatikan kestabilan lereng.

Kawasan rawan bencana gerakan tanah di Kabupaten Aceh Tengah terutama di Kawasan rawan gerakan tanah tinggi seluas 9.727,47 Ha, meliputi:

1. Kecamatan Linge seluas 3006,6 Ha, meliputi Kampung Kemerleng, Kute Rayang, Arul Item, Penarun, Lumut, Ise-Ise dan Kampung Reje Payung.
2. Kecamatan Jagong Jeget seluas 1.704,31 Ha, meliputi Kampung Paya Dedep, Merah Said, dan Kampung Brawang Dewal.
3. Kecamatan Rusip Antara seluas 5016,56 Ha, meliputi Kampung Arul Pertik, Pantan Pertik, Lut Jaya, Tanjung dan Kampung Merandeh Paya.

Kawasan rawan bencana gunung api di Kabupaten Aceh Tengah terutama adalah Kecamatan Kute Panang dan Kecamatan Ketol yang berasal dari aktifitas Gunung Berapi Geureudong (Burni Telong) yang berada dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah. Pada wilayah tersebut terdapat lokasi rawan gunung api bahaya dan rawan gunung api waspada. Untuk mengurangi kerusakan atau mencegah bencana akibat letusan gunung api perlu dilakukan sistem penanggulangan yang terprogram dengan baik sesuai dengan perulangan letusan gunung api yang bersangkutan. Pencegahan dapat dilakukan sebelum, pada waktu kejadian dan purna letusan akibat bencana susulannya.

1.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena diyakini akan berdampak signifikan bagi kemajuan daerah. Selain berdasarkan beberapa permasalahan pembangunan di atas, isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Tengah disusun dengan memperhatikan isu strategis nasional, isu strategis Aceh dan isu strategis daerah.

Pada dokumen RPJPD Kabupaten Aceh Tengah 2007-2027 telah diamanatkan target capaian pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tengah setiap 5 (lima) tahun selama 4 (empat) periode RPJMD. Dalam dokumen RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Dengan adanya indikator dan target yang ditetapkan tersebut, maka menjadi sangat penting untuk mengetahui kondisi capaian sebagai data dasar bagi perencanaan menengah tahun 2017-2022. Oleh karena itu, diperlukan isu-isu strategis dalam mendorong pembangunan Kabupaten Aceh Tengah. Isu Strategis sendiri adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik: bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik lingkungan, sosial budaya, ekonomi keuangan dan legal kelembagaan. Adapun isu-isu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Isu Strategis Kabupaten Aceh Tengah

Isu Strategis	Tujuan
Penguatan nilai-nilai ke-Islaman, sosial dan budaya	Penurunan angka pelanggaran Syariah Islam dan peningkatan kepekaan sosial serta membangun kembali nilai-nilai budaya yang Islami terutama sikap pengabdian dan berorientasi ke masa depan
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan. Di samping itu, isu strategis ini juga diarahkan untuk menempatkan pimpinan SKPK sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian, serta menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat

Isu Strategis	Tujuan
Pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup Menurunkan dampak risiko bencana Menurunkan risiko gagal panen komoditas pertanian
Pengembangan pertanian, ketahanan pangan dan agroindustri	Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian dalam arti luas (agroindustri) Menghasilkan pendapatan daerah melalui ekspor dan Meningkatkan pendapatan masyarakat Mendukung pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh masyarakat menjamin ketersediaan, distribusi dan pemerataan pangan
Pengembangan Agrowisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisata domestik dan mancanegara Penerimaan asli daerah dan pendapatan bagi masyarakat pelaku usaha pariwisata
Peningkatan kualitas tenaga kerja, Industri dan Investasi	Menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengembangan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah dan kawasan strategis kabupaten	Menurunkan kesenjangan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan siap menghadapi dunia kerja
Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga	Mengembangkan inovasi dan jiwa enterprenur untuk menghindari pengangguran intelektual serta mencegah risiko penyalahgunaan narkotika
Gender, Perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender dan kesejahteraan PMKS Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Tengah

1.3 Analisis Tren dan Perkembangan Daerah

Konsep pelaksanaan *Smart City* Kabupaten Aceh Tengah dimulai sejak membuka pelayanan Aceh Tengah *Command Center* (ATCC). Kehadiran ATCC berfungsi sebagai pemantauan dan penyajian informasi untuk mengambil keputusan dan kebijakan terhadap suatu persoalan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fungsi penyampaian informasi dimaksud melalui tampilan dashboard portal layanan Aceh Tengah *Smart Regency* dan aplikasi Aceh Tengah Satu Data (*Smart Connectivity*). Konsep *Smart City* Kabupaten Aceh Tengah sendiri memiliki pilar - pilar yang terus berkembang sampai dengan saat ini.

Penerapan konsep *Smart City* sangat berkaitan erat dengan 6 (enam) pilar *Smart City* yaitu tentang tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*) tentu tidak akan lepas daripada kegiatan-kegiatan dan program yang telah dilakukan sebelumnya.

1.4 Analisis Data Saing Daerah

Sebagai daerah yang sedang berkembang, Kabupaten Aceh Tengah masih bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Sesuai dengan data PDRB Tahun 2011 Kabupaten Aceh Tengah sektor pertanian menyumbang 45,76 persen, namun terdapat kecenderungan sektor lainnya juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini berarti perekonomian Kabupaten Aceh Tengah mulai beralih dari sektor primer (pertanian dan pertambangan) ke sektor tersier (jasa-jasa).

2. Analisis Kesiapan Daerah

2.1 Struktur

Analisis struktur daerah dilakukan untuk mengetahui kondisi dari unsur utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan sebuah daerah. Struktur atau komponen inti dari sebuah daerah mencakup sumber daya manusia, kapasitas keuangan daerah, dan sumber daya pemerintah daerah.

2.1.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah secara administrasi tahun 2020 sebesar 215.576 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 109.262 dan perempuan 106.314 yang tersebar pada 15 (lima belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Jumlah penduduk selalu mengalami pertumbuhan disebabkan karena adanya kelahiran, kematian dan pindah datang penduduk. Secara rinci perkembangan penduduk Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan kecamatan dan laju pertumbuhan penduduk disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan penduduk per tahun (%)
1	Linge	11.201	4,82
2	Atu Lintang	6.989	0,67
3	Jagong Jeget	10.352	5,09
4	Bintang	10.773	4,97
5	Lut Tawar	19.664	11,1
6	Kebayakan	17.900	3,52
7	Pegasing	22.733	8,75
8	Bies	8.162	8,49
9	Bebesen	41.010	2,5
10	Kute Panang	8.400	5,07
11	Silih Nara	24.581	0,97
12	Ketol	14.928	8,83
13	Celala	10.297	4,52
14	Rusip Antara	8.586	17,3
Aceh Tengah		215.576	1,45

Sumber: Sensus Penduduk Tahun 2020 Badan Pusat Statistik

Tingkat literasi masyarakat terhadap konsep Smart City meskipun belum merata, namun sudah cukup menjadi modal bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam meningkatkan persentase literasi masyarakat yang bukan hanya sekedar tahu dan bisa, tetapi juga mampu mensosialisasikan *Smart City awareness* kepada lingkungannya.

Tabel 3. Analisis Kualitas SDM Daerah

No	Komponen	Interpretasi			
		Nilai/Kondisi	Baik	Sedang	Buruk
1	Jumlah komunitas minat bakat/ hobi / kreatif di daerah	205	√		
2	Adanya komunitas pengembang /developer perangkat lunak TIK di daerah	1		√	
3	Adanya digital start up di daerah	7		√	
4	Adanya perguruan tinggi di daerah	4	√		
5	Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah daerah	27 orang		√	

No	Komponen	Interpretasi			
		Nilai/Kondisi	Baik	Sedang	Buruk
6	Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun	100 kasus	√		
7	Jumlah angka kriminalitas dalam satu tahun	134		√	
8	Jumlah tindakan perusakan fasilitas umum dalam satu tahun	0	√		
9	Jumlah kegiatan tawuran antar kelompok warga dalam satu tahun	0	√		

Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Aceh Tengah, 2019

Berlandaskan analisis terhadap komponen kualitas sumber daya manusia daerah di Kabupaten Aceh Tengah dijelaskan bahwa tingkat kapasitas masyarakat dalam menerima, mengembangkan, atau mengimplementasikan konsep *Smart City* dalam interpretasi yang baik. Secara kuantitatif Kabupaten Aceh Tengah memiliki banyak komunitas dan relawan TIK dan didukung juga jumlah Perguruan tinggi yang sangat responsif terhadap perkembangan *Smart City*. Universitas Gajah Putih dan IAIN Gajah Putih merupakan dua universitas yang terlibat aktif dalam pengembangan TIK bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM dengan menyelenggarakan beasiswa terhadap putra putri daerah terbaik. Beasiswa tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk yang memiliki prestasi akademis, tapi juga untuk kemampuan non-akademis seperti olahraga dan seni. Selain itu ada juga beasiswa untuk santri dan masyarakat yang memiliki bakat dalam membaca al-quran serta tausyiah. Walaupun menuju kabupaten pintar yang akan berbasis pada teknologi, Kabupaten Aceh Tengah tidak akan melupakan identitasnya sebagai Kabupaten yang islami.

Dari segi keamanan Kabupaten Aceh Tengah sangat kondusif. Tawuran antar warga sangat jarang terjadi. Jumlah pelanggaran ketertiban umum juga masih dalam keadaan baik tidak sampai mengganggu ketertiban umum. Tidak adanya kasus perusakan fasilitas umum dimana angka ini sangat baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Angka kriminalitas yang relatif rendah tersebut terwujud karena nilai-nilai islami yang ditanamkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Konflik antar warga sangat jarang terjadi karena masyarakat dibimbing untuk mengamalkan nilai keislaman dalam keseharian.

2.1.2 Sumber Daya Pemerintah

Kabupaten Aceh Tengah memiliki visi mewujudkan Masyarakat Damai, Sehat, Cerdas, Religius Dan Bermartabat Menuju Masyarakat Aceh Tengah Adil Dan Sejahtera. Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama masyarakat berkewajiban untuk mendorong dan memajukan pembangunannya sebagaimana tujuan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan serta memahami peran dan posisi daerahnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 kecamatan dan 295 gampong/desa yang bisa dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nama Ibukota Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Gampong 2019	Jumlah Gampong 2020
1	Linge	26	26
2	Atu Lintang	11	11
3	Jagong Jeget	10	10
4	Bintang	24	24
5	Lut Tawar	18	18
6	Kebayakan	20	20
7	Pegasing	31	31
8	Bies	12	12
9	Bebesen	28	28
10	Kute Panang	24	24
11	Silih Nara	33	33
12	Ketol	25	25
13	Celala	17	17
14	Rusip Antara	16	16
Jumlah		295	295

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Tengah, 2020

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap sumber daya pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, didapat tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program Smart City sudah bernilai cukup baik dimana telah memiliki kekuatan sumber daya di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah saat ini sebanyak 5471 pegawai dimana 3.233 orang adalah lulusan Sarjana hingga Doktor.

Tabel 5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Tengah

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sampai dengan SD	9	0	9
2	SMP/Sederajat	26	9	35
3	SMA/Sederajat	587	375	962
4	Diploma I, II/Akta I, II	63	190	253
5	Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	123	762	885
6	Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	1226	2007	3233
Jumlah	2019	2053	3418	5471

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Tengah, 2019

Tabel 6. Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas	277	√		
2	Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika	30	√		
3	Jumlah relawan TIK di daerah				
4	Persentase jumlah unit komputer (PC & Laptop) terhadap jumlah pegawai	50%	√		
5	Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai	31.52%			
6	Persentase pegawai berusia 40 -50 tahun terhadap jumlah pegawai	34.38%			
7	Persentase pegawai berusia 25 -40 tahun terhadap jumlah pegawai	34.10%			
8	Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah	68	√		
9	Persentase ketersediaan jaringan broadband access terhadap jumlah kantor pemerintahan	96%	√		
10	Persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintahan	92%		√	
11	Jumlah lokasi wireless internet (hotspot) dikawasan perkantoran pemerintahan	4			√
12	Ketersediaan data center (baik yang dikelola sendiri maupunmanage service) untuk kepentingan pemerintahan	Tersedia		√	

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
13	Ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan	Tersedia			√
14	Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang interoperable	Tersedia	√		
15	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperable	Tersedia		√	
16	Ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang interoperable	Tidak Tersedia			
17	Ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperable	Tersedia		√	
18	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang interoperable	Tidak Tersedia			
19	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperable	Tidak Tersedia			
20	Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang interoperable	Tersedia		√	

Sumber: Statistik Sektorial Kabupaten Aceh Tengah, 2019

2.1.3 Kapasitas Keuangan Daerah

Perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang disajikan merupakan Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang bersifat indikatif. Kemampuan keuangan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan informasi terkini terkait keuangan daerah yang sangat tergantung pada kemampuan sumber-sumber yang tersedia dan besarnya kewajiban belanja daerah setiap tahun berjalan. Hasil proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa, pada Tahun 2018 diperkirakan berjumlah sebesar Rp1.287.176.938.844,00 dimana jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2022, yaitu berjumlah Rp 1.604.013.710.437,73. Untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	Data Tahun Dasar 2019	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
1	Pendapatan	1.381.496.870.590,00	3,00 %	1.348.060.285.535,00	1.388.502.094.101,05	1.430.157.156.924,08	1.473.061.871.631,80	1.517.253.727.780,76
2	Pencarian Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	50.926.247.214,98	5,00%	9.750.000.000,00	9.262.500.000,00	8.799.375.000,00	8.359.406.250,00	7.941.435.937,50
	Total Penerimaan	1.423.423.117.804,98		1.357.810.285.535,00	1.397.764.594.101,05	1.438.956.531.924,08	1.481.421.277.881,80	1.525.195.163.718,26
	Dikurangi							
4	Pengeluaran Pembiayaan	23.521.060,00	5,60%	3.450.000.000,00	3.650.000.000,-	3.850.000.000,00	4.050.000.000,00	4.250.000.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.432.399.596.744,98		1.354.360.285.535,00	1.394.114.594.101,05	1.453.106.531.924,08	1.477.371.277.881,80	1.520.945.163.718,26

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, 2020

Selanjutnya Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan yang tersedia tersebut dipergunakan untuk membiayai Rencana Alokasi Pengeluaran berdasarkan skala Prioritas (Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III). Pengalokasian dana untuk prioritas I terlebih dahulu diutamakan sebelum dialokasikan untuk Prioritas II dan Prioritas III. Demikian sebaliknya, terhadap Prioritas III, akan dipenuhi setelah Prioritas I dan II terpenuhi pendanaannya. Adapun rencana pengeluaran terhadap masing-masing prioritas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Prioritas I adalah alokasi anggaran untuk belanja-belanja yang bersifat tidak langsung, seperti belanja pegawai, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Belanja Tidak Terduga.

Prioritas II adalah alokasi anggaran berhubungan langsung dengan kepentingan publik, memiliki kepentingan dan nilai/manfaat yang tinggi, serta memberikan dampak luas kepada masyarakat dalam rangka pada pencapaian visi/misi daerah. Program pembangunan daerah pada prioritas ini, diantaranya alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 20 (dua puluh) persen dan kesehatan sebesar 10 (sepuluh) persen dari Total APBD.

Disamping itu juga diperuntukkan bagi belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang/jasa. Prioritas III merupakan alokasi anggaran untuk masing-masing urusan/bidang urusan yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Hal ini juga berkaitan dengan dengan layanan dasar serta tugas pokok dan fungsi, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan administrasi perkantoran serta program pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan SKPK. Untuk mengetahui rencana alokasi anggaran untuk digunakan berdasarkan masing-masing prioritas selama periode 2018-2022.

Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang jelas dan komitmen pemimpin daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan Smart City yang maksimal. Selain itu, dibutuhkan perencanaan yang matang serta memprediksi dampak yang akan dihasilkan setelah mengimplementasikan konsep *Smart City*.

Tabel 8. Analisis Kapasitas Keuangan Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	12.34%	√		
2	Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu	Rp. 9.750.000.000,00		√	
3	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah				
	- Belanja Langsung	8.8%		√	
	- Belanja Tidak Langsung	60.5%		√	
4	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja Daerah	9.2%		√	
5	Jumlah Anggaran untuk Belanja <i>Smart City</i> yang dapat dialokasikan di dalam APBK Tahun 2020	Rp. 121.857.575.512,00		√	
6	Jumlah Anggaran untuk Belanja <i>Smart City</i> yang dapat dialokasikan di dalam APBK Tahun 2021	Rp. 158.414.848.166,00		√	
7	Jumlah program pembangunan untuk mendukung <i>Smart city</i> di daerah	-			
8	Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah	Rp. 41.576.081.173,00	√		
9	Jumlah sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung <i>Smart City</i>	-			

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, 2020

2.2 Infrastruktur

2.2.1 Infrastruktur Fisik

Kesiapan infrastruktur fisik di Kabupaten Aceh Tengah memberi gambaran dan ukuran kondisi sarana dan prasarana fisik yang menjadi titik tolak dalam pembangunan Smart City daerah. Kabupaten Aceh Tengah dari sisi ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah ditunjang oleh kondisi jalan dan jaringan jalan yang baik serta terkoneksi Kabupaten Tetangga merupakan sentral (Kota Transit wilayah tengah Aceh) baik itu kewilayah Timur Aceh, kewilayah barat maupun kewilayah utara didukung lagi dengan lapangan Udara Rembelee yang berada di perbatasan Kabupaten Bener Meriah, Ketersediaan infrastruktur perhubungan didukung dengan beroperasinya jalan EX PT KKA dari Bener Meriah ke Lhoksumawe semakain mempermudah arus transportasi barang dan orang dari dan ke Takengon dengan sendirinya peningkatan wisatawan akan membangkitkan ekonomi secara menyeluruh dan membuka lapangan kerja dan lapangan usaha yang lebih luas. Daya saing daerah Kabupaten Aceh Tengah akan semakin baik karena didukung oleh Pengembangan Rumah Sakit Regional yang akan membawahi kabupaten terdekat lainnya. Sarana lalu lintas juga cukup lengkap seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Banyaknya Sarana Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Aceh Tengah

No.	Sarana Lalu Lintas Jalan	Satuan	Jumlah (2019)
1	Rambu Jalan	Buah	854
2	Marka Jalan	Meter	14.023
3	RPPJ	Buah	26
4	Traffic Light	Unit	10
5	Warning Light	Unit	14
6	Halte	Buah	5
7	Papan Nama Jalan	Buah	34
8	Pagar Pengaman	Meter	416

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh Tengah, 2020

Untuk kawasan bisnis dan perkantoran tersebar di pusat Kabupaten Aceh Tengah. Untuk kegiatan pasar tradisional perdagangan masyarakat tersebar di beberapa kecamatan

Kabupaten Aceh Tengah antara lain yang terbesar berada di kecamatan Lut Tawar, Bebesen dan Silih Nara. Daftar pasar tradisional berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Daftar Pasar Tradisional Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Nama Pasar
1	Bebesen	Pasar Paya Ilang
		Pasar Musara Alun
2	Bintang	Pasar Bintang
3	Celala	Pasar Celala
4	Lut Tawar	Pasar Inpres
		Inpres Mall
		Pasar Bale Atu
		Pasar Bawah
5	Atu Lintang	Pasar Merah Mege
		Pasar Atu Lintang
6	Jagong Jeget	Pasar Jagong Jeget
7	Ketol	Pasar Ketol
8	Silih Nara	Pasar Angkup
		Pasar Arul Kumer
9	Rusip Antara	Pasar Rusip Antara
10	Linge	Pasar Linge
11	Kute Panang	Pasar Kute Panang

Sumber: Statistik Sektorial Kabupaten Aceh Tengah, 2019

Tabel 11. Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	52%	√		
2	Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal/dihitung atas panjang jalan aspal pada jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten	1.05%		√	
	Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal/ dihitung atas panjang jalan aspal pada jalan di kota Takengon	31.81%	√		
3	Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	80%	√		
4	Persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik	60%	√		
5	Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis	4 Zona	√		
6	Adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat	4 Zona	√		

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
7	Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik	85%	√		
8	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	83,3%	√		
9	Persentase sarana prasarana elektrikal	95%	√		

Sumber: Statistik Sektorial Kabupaten Aceh Tengah, 2019

Di bidang pendidikan, dari 184 sekolah negeri/swasta, hanya terdapat beberapa yang harus mendapatkan prioritas rehabilitasi dan revitalisasi. Pada umumnya kondisi gedung dan ruang kelas secara umum sudah baik. Hal ini tentunya bersifat dinamis sejalan dengan usia manfaat dan usia fisik dari gedung dan prasarana/sarana itu sendiri. Maka pemerintah daerah akan dapat mengukur seberapa banyak pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mencapai visi *Smart City* daerah.

Ditinjau dari sektor kesehatan, dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2020 Kabupaten Aceh Tengah memiliki 2 unit rumah sakit, 16 unit puskesmas, 43 puskesmas pembantu dan 13 apotik. Secara umum sarana dan prasarana rumah sakit yang tersedia masih perlu ditambah. Beberapa rumah sakit juga sudah menerapkan sistem berbasis elektronik dalam hal pelayanan dan administrasi.

2.2.2 Infrastruktur Digital

Peran teknologi komunikasi dan informatika merupakan salah satu penopang dalam pengoperasian konsep *Smart City*. Oleh Karena itu diperlukan dukungan infrastruktur yang didukung oleh provider jasa telekomunikasi dan *supply* energi listrik yang berkesinambungan serta tidak terputus. Di Kabupaten Aceh Tengah, persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G sudah 90% dengan skala layanan jaringan di level kurang bagus, bagus dan sangat bagus. Jaringan intra dan antara perangkat daerah menggunakan insfrastruktur jaringan *fiber optic* (FO) dan radio wireless.

Tabel 12. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

NO	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Ya/ Tidak	Keterangan (Jumlah Sebaran, Kapasitas, Status)
1	Ketersediaan Jaringan 4G/3G	Ya	90%
2	Ketersediaan Broadband Acces	Ya	96%
3	Akses Internet Terpusat (didistribusikan)	Tidak	-
4	Jaringan Antar SKPK (Instansi pemerintah)	Ya	50 OPD
5	Ketersediaan Hotspot untuk internal Pemerintah dan untuk Publik	Ya	4 Lokasi
6	Data Center Pemerintah	Ya	Tersebar di 8 OPD
7	Data Center Recovery Pemerintah	TIDAK	-

Sumber: Data Hasil Survey Bidang TIK Diskominfo Kabupaten Aceh Tengah, 2019

2.2.3 Infrastruktur Sosial

Infrastruktur sosial merupakan fasilitas yang dibangun untuk memudahkan kemudahan keperluan masyarakat umum dalam melakukan aktivitas sosial keseharian mereka. Pemerintah bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur sosial tersebut, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Selain daripada itu, pihak swasta pun turut mengambil peran penting dalam pengadaan dan penyediaan infrastruktur sosial, mengingat ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi 100% kebutuhan bagi warganya. Di Kabupaten Aceh Tengah telah terbangun infrastruktur pendidikan dimulai dari TK sebanyak 182 sekolah, SD sebanyak 193 sekolah, SMP sebanyak 49 sekolah, SMA sebanyak 20 sekolah, SMK sebanyak 5 sekolah dan SLB sebanyak 9 sekolah.

Tabel 13. Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Pegasing	21	18	5			
2	Bies	7	7	1			
3	Silih Nara	20	18	4			
4	Ketol	11	22	5			
5	Bebesen	24	17	6			
6	Kebayakan	15	10	2			
7	Bintang	14	13	4			

No	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
8	Celala	8	10	3			
9	Rusip Antara	6	10	3			
10	Jagong Jeget	8	8	2			
11	Atu Lintang	9	8	1			
12	Lut Tawar	12	10	5			
13	Linge	12	17	6			
14	Kute Pananng	15	25	2			
15	14 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah				20	5	9
Jumlah		182	193	49	20	5	9

Sumber: Statistik Sektorial Kabupaten Aceh Tengah, 2019

Sektor layanan kesehatan, masyarakat ditopang oleh layanan 2 unit rumah sakit umum/swasta, 341 unit rumah bersalin, 17 unit Puskesmas, 53 unit puskesmas pembantu dan 30 Puskesmas keliling.

Tabel 14. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit (Umum + Swasta)	2
2	Rumah Bersalin	341
3	Puskesmas	17
4	Puskesmas Pembantu	53
5	Polindes/ Poskesdes	211
6	Posyandu	323
7	Klinik/ Balai Kesehatan	4
8	Puskesmas Keliling	30

Sumber: Statistik Sektorial Kabupaten Aceh Tengah, 2019

Tabel 15. Ketersediaan Fasilitas Kegiatan Belajar dan Perpustakaan Kabupaten Aceh Tengah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat kelurahan/desa	5		√	
2	Adanya ruang terbuka publik di tingkat RW	14	√		
3	Adanya aula/balai warga di tingkat kelurahan/desa	50	√		
4	Jumlah fasilitas olahraga di tingkat kelurahan/ desa	26	√		

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
5	Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah				
	- Perpustakaan Kabupaten	1	√		
	- Perpustakaan Keliling	2		√	
6	Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh masyarakat	2		√	
7	Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh kampung	60	√		

Sumber: Statistik Sektorial Kabupaten Aceh Tengah, 2019

2.3 Superstruktur

Superstruktur merupakan langkah penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.

2.3.1 Kesiapan Kebijakan Daerah

Kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Begitu pun dengan inisiatif *Smart City* yang dilaksanakan di daerah, memerlukan seperangkat kebijakan untuk menjamin pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebelum gaung smart city berjalan juga sudah membuat kebijakan-kebijakan untuk mendukung Kabupaten Aceh Tengah menjadi lebih baik dengan di topang dengan beberapa regulasi sejak tahun 2017 sampai saat ini.

Tabel 16. Ketersediaan Kebijakan Daerah dalam mendukung TIK Kabupaten Aceh Tengah

No	Tahun	Nomor	Tentang	Dimensi
1	2017	78	Peraturan Bupati tentang pedoman sistem informasi kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah	<i>Smart Society</i> <i>Smart Governance</i>
2	2019	28	Peraturan Bupati tentang rencana induk pengembangan e-government Kabupaten Aceh Tengah	<i>Smart Governance</i>
3	2019	70	Peraturan Bupati tentang pedoman sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dilingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	<i>Smart Governance</i>

No	Tahun	Nomor	Tentang	Dimensi
4	2017	016/482/D ISKOMIN FO/2017	Surat Keputusan Bupati tentang nama domain/ sub domain dan surat elektronik pada satuan kerja perangkat Kabupaten Aceh Tengah	<i>Smart Governance</i>
5	2019	480/24/DI SKOMINF O/2019	Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan/ penetapan tim teknis pengelola website Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2020	<i>Smart Governance Smart Society</i>
6	2019	489/372/D ISKOMIN FO/2019	Informasi dan Pelayanan Informasi (PPID) Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019	<i>Smart Branding Smart Governance Smart Society</i>
7	2019	070/519/D ISKOMIN FO/2019	Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan/ penetapan komite, tim koordinasi, tim evaluasi dan tim teknik Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah	<i>Smart Governance</i>
8	2019	188.4.45/2 8/HKM/20 19	Website jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019	<i>Smart Governance</i>
9	2020	061/117/O RGS/2020	Pengelolaan pengaduan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat sistem pengelolaan pengadaan pelayanan publik nasional Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2020	<i>Smart Society Smart Governance</i>

Sumber: JDIH Kabupaten Aceh Tengah, 2020

2.3.2 Kesiapan Lembaga Daerah

Kelembagaan daerah merupakan perangkat non-fisik selanjutnya setelah kebijakan yang sangat menentukan keberlanjutan pelaksanaan *Smart City* di daerah dari sisi pengelola kabupaten, yaitu pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten bisa segera membentuk Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City*

2.3.3 Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

Disamping aspek kebijakan dan kelembagaan, terdapat satu aspek non-fisik selanjutnya yang akan menjadi penentu dari keberlanjutan *Smart City* di daerah. Aspek tersebut adalah aspek organisasi di masyarakat sipil. Aspek ini menjadi salah satu aspek dalam kesiapan *Smart City* karena aspek partisipasi masyarakat yang digerakkan di dalam organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu inti dari *Smart City*. Di Kabupaten Aceh

Tengah terdapat beberapa perguruan tinggi swasta. Dari beberapa perguruan tinggi tersebut, perguruan tinggi Gajah Putih, memiliki lembaga pengabdian masyarakat dan telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu, adanya forum-forum swadaya masyarakat yang tergabung dalam komunitas-komunitas hobi dan profesi secara nyata telah mendorong *Smart City* ke arah tatanan implementatif.

Tabel 17. Ketersediaan organisasi dan kegiatan pendukung smart city Kabupaten Aceh Tengah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Jumlah komunitas minat bakat/ hobi/ kreatif di daerah	205	√		
2	Adanya komunitas pengembang / developer perangkat lunak TIK di daerah	1		√	
3	Adanya digital start up di daerah	7		√	
4	Adanya perguruan tinggi di daerah	4	√		
5	Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah daerah	27 orang		√	
6	Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun	100 kasus	√		
7	Jumlah angka kriminalitas dalam satu tahun	134 kasus		√	
8	Jumlah tindakan perusakan fasilitas umum dalam satu tahun	0	√		
9	Jumlah kegiatan tawuran antar kelompok warga dalam satu tahun	0	√		

Sumber: Statistik Sektorial Kabupaten Aceh Tengah, 2019

3. Analisis Kesenjangan

3.1 Analisis Kesenjangan *Smart Governance*

Tabel 18. Analisis Kesenjangan *Smart Governance*

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Kepala daerah terhadap <i>Smart city</i> 2. Adanya Perwal/Regulasi terkait dengan <i>Smart city</i> 3. Adanya command Center 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM IT yang sesuai dengan spesifik keahlian. 2. Banyak Tenaga Ahli berstatus pegawai tidak tetap. 3. Sosialisasi internal dan eksternal pemerintah terkait dengan <i>Smart city</i> masih kurang 4. <i>Data Base</i> yang belum terintegrasi. 5. Sulit untuk beralih dari kebiasaan yang lama. 6. Belum adanya SOP tentang keamanan sistem. Perlu adanya ISO 27001 <i>certificate</i> dan SNI tentang keamanan data. 7. Layanan Intrakoneksi antar SKPK belum semuanya terlayani secara FO 8. Rendahnya koordinasi antar SKPK. 9. Belum adanya <i>assessment</i> kerentanan keamanan
Faktor Eksternal		

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats

		<p>sistem (<i>security vulnerability sistem</i>) secara teratur sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>10. Pengambilan kebijakan belum berbasis data baik eksekutif maupun legislatif.</p>
--	--	---

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan infrastruktur seperti Pemasangan jaringan FO, <i>Access Point</i> (free akses) di kawasan dalam Kabupaten Aceh Tengah yang memungkinkan adanya peluang kerjasama dengan pemerintah kota/kab lainnya di Indonesia terkait <i>sharing</i> data dan teknologi dalam pengembangan sistem e-government dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta. 2. Adanya fasilitas pembangunan sistem TIK dari Dinas Kominfo. 3. Sosialisasi kepada masyarakat tentang layanan aplikasi e-governmence. 4. Adanya kesempatan merekrut tenaga ahli non PNS 5. Komunitas yang mendukung <i>Smart city</i>. 	<p>Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan intrakoneksi dan layanan aplikasi yang telah terbangun 2. Memanfaatkan program / kegiatan yang termsauk ke dalam RPJMD Kabupaten Aceh Tengah. 3. Melakukan kolaborasi antar pimpinan daerah, SKPK, institusi pendidikan, komunitas, media dan pelaku usaha. 	<p>Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan fungsi Komite TIK dengan memberikan deskripsi pekerjaan yang jelas. 2. Mengintegrasikan layanan aplikasi secara bertahap dan dilakukan <i>assessment</i> sebelum proses integrasi. 3. Memperbanyak bimbingan teknis TIK 4. Membuat SOP keamanan sistem, SOP data center dan SOP lainnya terkait pengelolaan TIK. 5. Membuat Bank data. 6. Membangun intrakoneksi OPD keseluruhan menggunakan FO dengan topologi yang tepat dan saling backup.
<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM untuk jangka waktu yang lama (SDM bidang TIK rata-rata berstatus kontrak). 	<p>Strategi Ancaman dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perjanjian kerja jangka panjang seperti pegawai tetap non pns. 	<p>Strategi Kelemahan dan Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan anggaran di bidang TIK terkait SPBE.

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats

<p>2. Kurangnya program kegiatan <i>Capacity Building</i> SDM TIK dan Non- TIK</p> <p>3. Adanya peluang penyalahgunaan hak akses data oleh penjahat siber karena belum adanya sensor/IDS/IPS untuk mendeteksi ancaman terhadap sistem.</p> <p>4. Adanya gangguan virus/<i>malware</i> karena belum adanya anggaran dalam pembaharuan <i>license antivirus</i>.</p> <p>5. Penolakan dari masyarakat</p> <p>6. Pergantian kepala daerah</p>	<p>2. Dalam hal keamanan sistem dengan mengimplementasikan sesuai regulasi yang di tuangkan oleh BSSN dalam Nomenklatur Program dan Kegiatan Urusan Persandian yang dikeluarkan pada Minggu Keempat Bulan November 2018.</p> <p>3. Memperkuat hubungan kerjasama antar pimpinan, lembaga dan instansi untuk memperkecil ancaman</p> <p>4. Membentuk team admin TIK yang kuat.</p> <p>5. Kolaborasi SKPK, institusi pendidikan, praktisi, komunitas dan pelaku usaha.</p> <p>6. Memasang sistem sensor seperti honeypot di jalur keluar dan masuk paket data, menerapkan IDS dan IPS sistem.</p> <p>7. Membangun mirroring server</p> <p>8. Melaksanakan kebijakan Pemerintah berhubungan dengan penempatan server masing-masing SKPK.</p>	<p>2. Meningkatkan kemampuan admin TIK dalam menangkal ancaman-ancaman di dunia siber.</p> <p>3. Meningkatkan <i>critical thinking, collaborative, communication</i> dan <i>creative</i></p>
---	---	--

3.2 Analisis Kesenjangan *Smart Branding*

Tabel 19. Analisis Kesenjangan *Smart Branding*

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aceh Tengah memiliki keunikan dan keindahan objek wisata; 2. Kondisi yang aman dan suasana yang memberikan kenyamanan; 3. Udara yang sejuk dan daya dukung lingkungan; 4. Mempunyai situs/destinasi unik dan berkelas dunia; 5. Keberagaman destinasi (wisata religi, wisata tamaddun dunia melayu, wisata kuliner, ekowisata); 6. Ada pelaku usaha lokal yang memproduksi barang-barang dan makanan ciri khas Aceh Tengah; 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan biaya anggaran pengembangan objek wisata dan branding daerah; 2. Kurangnya regulasi dan sarana prasarana yang mendukung branding daerah dan pariwisata; 3. Kurangnya inovasi, atraksi dan <i>event</i> pendamping; 4. Kurangnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung branding dan industri pariwisata; 5. Kurangnya perawatan terhadap objek wisata dan kurangnya fasilitas yang ada; 6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap industri wisata; 7. Kurangnya sosialisasi kepada <i>stakeholder</i> pariwisata; 8. Kurangnya fasilitas yang ramah kaum disabilitas.
Faktor Internal		
Faktor Eksternal		

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
		9. Belum adanya layanan sistem dan aplikasi yang bisa mempromosikan produk-produk local.
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah menjadikan pariwisata dalam visi - misi daerah; 2. Adanya rencana pemerintah daerah untuk mengembangkan Wisata; 3. Adanya otonomi daerah memberi keleluasaan untuk mengembangkan potensi wisata; 4. Terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar; 5. Tingginya keinginan untuk berwisata dan berekreasi baik wisatawan lokal dan wisman; 6. Aceh Tengah memiliki hal menarik yang disukai oleh 	<p>Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi secara verbal dan digital untuk mendukung promosi dan branding daerah 2. Membuat sistem pelaporan dan keluhan yang bisa digunakan oleh masyarakat lokal dan wisatawan 3. Meningkatkan standar higienitas, transparansi harga, dan kelengkapan/amenities fasilitas bagi wisatawan. 4. Memperbaiki dan menginventaris ulang tempat wisata dan meningkatkan standar pemahaman masyarakat terhadap wisata. 5. Diseminasi/penyebaran pemahaman kepada 	<p>Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan yang diambil; 2. Menggunakan data untuk analisis data dan forecasting sehingga anggaran yang diberikan bisa lebih baik dan efektif; 3. Dengan memanfaatkan data maka bisa dilakukan bisnis analisis untuk menentukan <i>event</i> apa yang bisa dibuat, cara branding daerah yang tertuju dan khusus secara efektif 4. Penyempurnaan regulasi 5. Memperbanyak sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap sapa pesona wisata

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>wistawan dalam dan luar negeri;</p> <p>7. Peningkatan <i>feedback</i> finansial bagi pebisnis lokal (akomodasi transportasi, souvenir, pemandu wisata, restoran);</p> <p>8. Membangun ekosistem wisata islami;</p> <p>9. Keberadaan pusat perbelanjaan dan pasar modern sebagai jawaban tuntutan kebutuhan masyarakat kota yang cepat, mudah, lengkap dan selalu tersedia;</p>	<p>masyarakat bahwa para wisata tidak identik dengan maksiat.</p> <p>6. Meningkatkan kerjasama dengan daerah untuk mendukung sektor wisata</p> <p>7. Meningkatkan peran pemanfaatan data untuk dilakukan analisis dari Branding Daerah, <i>event</i> efektif untuk pariwisata dan pengambilan kebijakan di bidang</p> <p>8. Meningkatkan pemanfaatan produk daerah yang akan bisa dimanfaatkan menjadi <i>branding</i> daerah dan memanfaatkan digital marketing</p>	<p>6. Meningkatkan kemampuan dalam membaca <i>demand</i> pasar</p> <p>7. Menambah infrastruktur yang <i>urgent</i> serta ramah disabilitas</p> <p>8. Membuat regulasi bukan hanya untuk pariwisata tapi juga memberikan regulasi agar sadar wisata</p>
<p>Ancaman</p> <p>1. Berkembangnya obyek wisata lain yang meningkatkan persaingan antar masyarakat;</p> <p>2. Kerusakan lingkungan akibat pengembangan yang seenaknya;</p> <p>3. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya keberadaan sebuah objek wisata;</p>	<p>Strategi Ancaman dan Kekuatan</p> <p>1. Memperbaiki tempat wisata agar lebih menarik dan memperbanyak tempat wisata baik bersifat heritage ataupun tempat wisata yang artificial</p> <p>2. Mempersiapkan daerah, lingkungan serta masyarakat yang sadar wisata</p>	<p>Strategi Kelemahan dan Ancaman</p> <p>1. Sosialisasi tentang wisata Aceh Tengah dan pelayanan wisata Aceh Tengah kepada masyarakat.</p> <p>2. Promosi wisata Aceh Tengah ke luar Aceh menggunakan digital dan data digital yang efektif</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>4. Degradasi moral/budaya; 5. Berkurangnya kepercayaan kepada <i>stakeholder</i> pariwisata</p>	<p>3. Penguatan Identitas Ke-Acehan dan keislaman. 4. Lebih kreatif dalam menciptakan <i>event</i> tahunan dan berdasarkan data 5. Menciptakan <i>event</i> peningkatan kualitas dan kesesuaian mentalitas syariah bagi pelaku wisata 6. Adanya peraturan daerah yang mengatur pasar modern dan digital</p>	<p>3. Memanfaatkan data untuk membentuk mindset, branding dan mempositifkan daerah Aceh Tengah 4. Perbaiki dan penambahan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seni dan budaya. 5. Pelatihan untuk mempromosikan produk dan jasa bagi pelaku usaha tingkat kecil</p>

3.3 Analisis Kesenjangan *Smart Economy*

Tabel 20. Analisis Kesenjangan Smart Economy

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	<p>Kekuatan</p> <p>1. Ekonomi masuk dalam 7 Misi Pembangunan Presiden Republik Indonesia dalam poin 1 yang isinya mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian</p>	<p>Kelemahan</p> <p>1. Perkembangan ekonomi kreatif belum optimal 2. Rendahnya minat entrepreneurship 3. UMKM kekurangan modal dan tidak bagusnya pembukuan akuntansi 4. Lapangan pekerjaan yang kurang variatif</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats

Faktor Eksternal	<p>ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.</p> <p>2. Kebijakan ekonomi kreatif yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia</p> <p>3. Penguatan Ekonomi kerakyatan termasuk dalam prioritas dalam proses mengatasi kemiskinan tertuang dalam RPJM 2017-2022.</p> <p>4. Adanya beberapa usaha makanan dan minuman serta usaha jasa yang menyebar di seluruh Kabupaten Aceh Tengah</p> <p>5. Adanya UMKM yang bersebar di seluruh kecamatan di Aceh Tengah</p> <p>6. Adanya program <i>One Village One Product</i> (OVOP) dari Pemerintah.</p> <p>7. Adanya kebijakan penguatan koperasi-koperasi Syariah di seluruh Kabupaten Provinsi Aceh.</p>	<p>5. Konversi dari koperasi konvensional ke Syariah belum berjalan</p> <p>6. Sarana dan prasarana belum terpola dengan baik</p> <p>7. Belum adanya pengembangan model GIS dan IoT untuk industri</p> <p>8. Harga barang yang kurang stabil</p>
------------------	---	---

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<p>8. Adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).</p> <p>9. Adanya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)</p> <p>10. Pemberdayaan Zakat Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Syar'i"</p> <p>11. Keberadaan dana desa (DD) dan alokasi dana gampong (ADG) yang mendukung UKM</p>	
<p>Peluang</p> <p>1. Peluang dan pangsa pasar yang dijanjikan oleh ekonomi kreatif masih terbuka lebar</p> <p>2. Industri kreatif sarat kandungan emosional yang mendorong perkembangan industri ini menjadi unggulan.</p> <p>3. Keberadaan pasar modern yang dianggap lebih menguntungkan konsumen menjadi ancaman bagi pedagang kecil terutama pedagang tradisional</p>	<p>Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <p>1. Pendekatan industri kreatif yang berorientasi kepada konsumen.</p> <p>2. Bimbingan teknis memberdayakan industri-industri kreatif dari tingkat Gampong seperti program OVOP.</p> <p>3. Mengembangkan pedagang kecil dan pasar tradisional berbasis digital</p> <p>4. Optimalisasi penggunaan DD/ADG untuk</p>	<p>Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <p>1. Mengoptimal industri kreatif dengan mengatur strategi dari penyediaan bahan dasar, produksi sampai ke penjualan dan mempromosikan usaha-usaha yang telah dibuat dan melibatkan seluruh stakeholder dari rantai bisnis.</p> <p>2. Memberdayakan komunitas-komunitas berbasis bisnis di tiap gampong.</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>4. Pembiayaan modal oleh DD/ADG, BPR ataupun program pemerintah seperti PUEM.</p> <p>5. Pembiayaan konversi koperasi konvensional ke Syariah oleh Pemerintah Provinsi</p>	<p>meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan UMKM-UMKM di tingkat gampong</p>	<p>3. Melatih UMKM-UMKM dalam membuat proposal sampai ke pembukuan akuntansi untuk mempermudah jika nantinya ada kebutuhan modal (peminjaman).</p> <p>4. Dengan banyaknya berkembang industri kreatif akan menyerap tenaga kerja.</p> <p>5. Pengembangan industri kreatif berbasis GIS dan IoT dengan melibatkan industri-industri startup di bidang perangkat lunak</p> <p>5. Mengajukan surat permohonan melalui Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Aceh Tengah ke Dinas Koperasi dan UKM Aceh dalam hal konversi dari konvensional ke Syariah</p> <p>6. Membuat sistem informasi dan sistem informasi eksekutif untuk memonitoring dan kebijakan terkait harga makanan di Kabupaten Aceh Tengah.</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
		<p>7. Rutin melaksanakan pasar murah di beberapa lokasi dalam waktu tertentu di yang informasinya selalu update di website resmi pemerintahan.</p> <p>8. Memberdayakan <i>market place local</i> terutama dalam memasarkan hasil industri-industri local bisa bekerjasama dengan lembaga lainnya terkait pembiayaan dan lain-lainnya.</p>
<p>Ancaman</p> <p>1. Keberadaan pasar modern yang dianggap lebih menguntungkan konsumen menjadi ancaman bagi pedagang kecil terutama pedagang tradisional</p> <p>2. Produksi Barang/makanan hasil dari UMKM-UMKM yang <i>expired</i> karena daya beli masyarakat rendah</p> <p>3. Masih banyak praktek rentenir dan riba yang jelas berlawanan dengan prinsip syariah sebagaimana diamanahkan dalam Qanun Pasal 21 Qanun 8 Tahun 2014. Kondisi simpan</p>	<p>Strategi Ancaman dan Kekuatan</p> <p>1. Meningkatkan kualitas pasar tradisional dengan ikut memasarkannya melalui pasar online dan dapat memberikan harga yang bersaing</p> <p>2. Mempromosikan produk-produknya ke <i>marketplace</i> baik local, nasional dan internasional.</p> <p>3. Memperkuat lembaga-lembaga keuangan syariah.</p>	<p>Strategi Kelemahan dan Ancaman</p> <p>1. Sarana dan prasarana ekonomi daerah melalui penciptaan pasar yang representative, mengupdate informasi harga pasar dan menstabilkan harga kebutuhan masyarakat.</p> <p>2. Peningkatan inovasi bagi pedagang pasar tradisional maupun toko berskala kecil agar tidak</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats

<p>pinjam dan perkreditan masih banyak menggunakan sistem bunga ribawi.</p>		<p>ditinggalkan oleh masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memberdayakan sistem layanan aplikasi dalam mempromosikan produk-produk UMKM 4. Memaksimalkan sumber-sumber retribusi dan pajak daerah, meningkatnya potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi 5. Mewujudkan pengembangan sentra industri dengan pemetaan terhadap potensi Industri 6. Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk membantu permodalan UMKM secara professional 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata 8. Penyediaan fasilitas wisata syariah yang diminati manca negara dan Timur Tengah 9. Menumbuh kembangkan kawasan strategis perdagangan, pariwisata, pertanian dan perikanan
---	--	---

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
		10. Peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima.

3.4 Analisis Kesenjangan *Smart Living*

Tabel 21. Analisis Kesenjangan Smart Living

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	Kekuatan	Kelemahan
Faktor Internal	1. Pelayanan berbasis internet sehingga mempermudah komunikasi. 2. Tersedianya regulasi kesehatan 3. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai dan memenuhi standar 4. Melakukan promosi kesehatan 5. Banyak tersedianya ruang terbuka hijau	1. Sulitnya menerapkan implementasi dari regulasi 2. Terkendala di proses pembiayaan bidang kesehatan 3. Sarana dan prasarana serta biaya yang masih kurang memadai 4. Sebagian kecil masyarakat tidak dapat menerima kondisi tersebut dikarenakan tanah diberikan untuk jarak bangunan dan jalan dilepaskan haknya untuk Negara. 5. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui keuntungan dan kemudahan
Faktor Eksternal		

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
		dalam pengelolaan air limbah melalui IPAL komunal.
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat ini banyak masyarakat umum yang membutuhkan transportasi umum yang cepat serta efisien dan terbukanya pemikiran masyarakat akan teknologi 2. Dari segi keamanan, CCTV juga terkoneksi dengan kepolisian, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan 3. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang maksimal 4. Promosi kesehatan yang lebih intensif 5. Lahan antara jarak bangunan dan jalan dapat dimanfaatkan untuk lahan terbuka hijau dan tempat parkir, 6. Pembangunan IPAL Komunal pada kawasan padat dan kumuh seperti di pasar-pasar. 	<p>Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terus meningkatkan penggunaan teknologi untuk mengikuti perkembangannya 2. Terus dapat mengontrol aktivitas melalui CCTV 3. Kurangnya kapasitas SDM petugas kesehatan 4. Kurangnya tenaga yang terampil 5. Kurang nya keinginan dalam masyarakat 6. Sedang direncanakan fasilitasi untuk lahan dimaksud 7. Aturan menentukan dan mengharuskan bahwa pembangunan IPAL komunal hanya pada kawasan permukiman dan tempat ibadah. 	<p>Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas internet gratis di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah bekerjasama dengan ISP yang ada 2. Masa berlaku perekaman oleh CCTV hanya berlaku seminggu, jika sudah lebih dari seminggu data CCTV akan hilang secara otomatis 3. Membuat kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan mutu petugas yg lebih berkualitas 4. Mengikutsertakan pada pelatihan/training untuk mendukung tenaga yang terampil

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
		<p>5. Sosialisasi warga masyarakat</p> <p>6. Sosialisasi warga masyarakat</p> <p>7. Perlunya lobi yang lebih meyakinkan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.</p>
<p>Ancaman</p> <p>1. Masyarakat semakin kritis dalam mendapatkan pelayanan kesehatan</p> <p>2. . Semakin terkurasnya lahan untuk pembangunan fisik sehingga semakin terkurasnya lahan terbuka hijau.</p> <p>3. Masyarakat tidak mau memberikan lahan dan tetap membangun bangunan pada daerah jarak bangunan dan jalan yang telah ditetapkan.</p>	<p>Strategi Ancaman dan Kekuatan</p> <p>1. Memberikan pelayanan yang terbaik</p> <p>2. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima, bermutu, dan berkualitas</p> <p>3. Pembangunan fisik bangunan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak swasta dan pemerintah.</p> <p>4. Bangunan yang dibangun pada lahan dimaksud menjadi bangunan liar dan tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan.</p>	<p>Strategi Kelemahan dan Ancaman</p> <p>1. Merekrut tenaga kesehatan yang berkompeten dan profesional</p> <p>2. Pemerintah dan pihak swasta juga harus ikut andil yang lebih besar terhadap keberlangsungan dan keberadaan lahan terbuka hijau.</p> <p>3. Perlunya ketegasan pemerintah melalui aparaturnya dari tingkat gampong, kecamatan dan SKPD yang bersangkutan.</p>

3.5 Analisis Kesenjangan *Smart Society*

Tabel 22. Analisis Kesenjangan Smart Society

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan infrastruktur cukup memadai. 2. Kemampuan masyarakat dalam mengadopsi perubahan sudah cukup baik. 3. Kondisi keamanan secara umum sudah sangat baik. 4. Komitmen pemerintah daerah dan legislatif sangat mendukung. 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber pendapatan daerah sangat terbatas 2. Adopsi perubahan masih belum maksimal kepada hal-hal yang positif 3. Efek kemajuan teknologi juga cukup signifikan pada perilaku negatif.
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 5. Banyak UKM-UKM yang telah terbentuk 6. Adanya komunitas start up 7. Tersedianya perangkat deteksi bencana di beberapa titik 8. Banyaknya fasilitas wifi di Warung Kopi 	<ol style="list-style-type: none"> 4. UKM-UKM yang terbentuk belum sepenuhnya di support oleh eksekutif dan legislative 5. Ketersediaan hotspot di ruang public belum akomodatif 6. CCTV belum merata ke gampong-gampong.
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang
1. Sosialisasi ke masyarakat tentang agenda-agenda perubahan		

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>2. Keamanan perlu di dukung dengan <i>Smart CCTV</i> yang saling terintegrasi</p> <p>3. Kerjasama dengan lembaga-lembaga/Dinas yang menangani KAMTIBMAS</p> <p>4. Pelatihan/Bimbingan Teknis kepada UKM-UKM untuk meningkatkan kualitasnya dari segi branding, produk dan marketing.</p> <p>5. Bersinergi dengan Perguruan tinggi dengan program Pengabdian masyarakat</p> <p>6. Pemasangan CCTV ke beberapa lokasi dalam Gampong-gampong yang dianggap perlu</p>	<p>1. Penguatan komunitas-komunitas start up/pengembang perangkat lunak</p> <p>2. Melibatkan komunitas <i>start up</i> dalam merancang proses bisnis dan aplikasi terkait <i>government to business</i> dan <i>government to society</i></p>	<p>1. Memberikan pelatihan usaha-usaha kreatif di tengah-tengah masyarakat bekerjasama dengan seluruh <i>stakeholder</i> terkait dan mempromosikan usaha-usaha yang telah dibuat.</p> <p>2. Integrasi dengan semua CCTV Public yang ada di Aceh Tengah walau di punyai oleh swasta/pertokoan</p>
<p>Ancaman</p> <p>1. Informasi Hoax berkembang cepat di media sosial</p> <p>2. Keamanan data yang belum terjamin</p> <p>3. Ancaman bencana alam dikarenakan posisi geografis wilayah di ujung Sumatera</p>	<p>Strategi Ancaman dan Kekuatan</p> <p>1. Sosialisasi undang-undang ITE</p> <p>2. Melibatkan komunitas berbasis <i>security</i> dalam menghadapi ancaman-</p>	<p>Strategi Kelemahan dan Ancaman</p> <p>1. Optimalisasi Parkir dan redistribusi sampah</p> <p>2. Meningkatkan kualitas remaja masjid</p> <p>3. Terus Mendukung UKM-UKM yang</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<p>ancaman terkait keamanan data</p> <p>3. Sosialisasi dan simulasi tentang kebencanaan</p> <p>4. Maintenance perangkat deteksi bencana</p>	<p>selama ini telah dilaksanakan dengan bantuan modal usaha dengan sistem syariah.</p> <p>4. Koordinasi dengan pemerintahan tingkat gampong dalam meningkatkan kamtibmas bisa itu dengan pendekatan dengan teknologi informasi maupun berbasis masyarakat.</p>

3.6 Analisis Kesenjangan *Smart Environment*

Tabel 23. Analisis Kesenjangan Smart Environment

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai menyadari pengguna sumber energi terbarukan sebagai sumber energi <i>alternative</i>. 2. Ada tenaga pembersih jalan raya yang rutin. <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kinerja layanan Air Minum, dan Sanitasi b. Meningkatnya Pelayanan system jaringan jalan dalam system transportasi. c. Tersedianya ruang terbuka hijau. d. Terwujudnya mitigasi kebencanaan yang tangguh dan handal. e. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapannya Waste Collection Point (WCP) belum menyeluruh ke semua daerah dan edukasi pengelolaan sampah butuh waktu untuk menumbuhkan kesadaran warga. 2. Pembersihan jalan yang belum menyeluruh dan masih ada debu di jalanan yang muncul setelah di sapu/disiram yang juga terkadang diakibatkan cuaca ekstrem (angin kencang). 3. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga fasilitas RTH, dimana, banyak pohon kurang terawat dan kurangnya tenaga kerja pemeliharaan taman/RTH
Faktor Eksternal		
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>1. Kesadaran tingkat kebutuhan akan sumber energi terbarukan sebagai suatu sumber listrik.</p>	<p>1. Memaksimalkan potensi lahan yang dimiliki untuk membuat RTH dan Solar Farm di Kabupaten Aceh Tengah</p> <p>2. Sosialisasi dan Pemberdayaan system WCP pada desa – desa lainnya.</p>	<p>Menumbuhkebangkan sumber energi terbarukan</p>
<p>Ancaman</p> <p>1. Kondisi geologi Kabupaten Aceh Tengah yang rawan bencana seperti longsor dan cuaca ekstrim.</p> <p>2. Sampah yang menimbulkan penyakit bila tidak tepat dalam penanganan sampah</p> <p>3. Penggunaan energi semakin tinggi dan mengandalkan sebagian besar energi fosil.</p>	<p>Strategi Ancaman dan Kekuatan</p> <p>1. SMS blast menginfokan kejadian bencana</p> <p>2. Sosialisasi untuk penanggulangan tanggap bencana</p> <p>3. Membuat berbagai video dalam penanganan sampah yang tepat, dan bekerjasama dengan komunitas dalam rangka sosialisasi dan mengedukasi warga terkait sistem Waste Colecting Point</p> <p>4. Pemerintah menyusun studi/kajian dan masterplan energi alternatif dan mengembangkan program</p>	<p>Strategi Kelemahan dan Ancaman</p> <p>1. Bekerjasama dengan Provider dan BMG untuk rutin dalam menginfokasikan kejadian bencana melalui sms blast.</p> <p>2. Menambah muatan lokal di sekolah untuk mendapatkan edukasi penanggulangan bencana. Sebagai tambahan, sekolah, gedung – gedung pemerintah maupun hotel – hotel harus memiliki SOP terkait evakuasi kebencanaan dan peta <i>emergency</i> bangunan jika</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats

	<p>pemanfaatan energi terbarukan ke level rumah tangga.</p> <p>5. Membuat masterplan dan pengembangan terintegrasi terkait dengan dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)</p> <p>6. Membuat ruang bermain ramah anak di setiap taman agar pemanfaatan RTH lebih maksimal.</p> <p>7. Melakukan perawatan terkait dengan RTH dan pemeliharaan pohon secara rutin.</p>	<p>terjadi bencana. Selain itu, setiap pertemuan yang dilakukan di gedung pemerintah maupun di hotel-hotel perlu diawali dengan memutar video SOP jalur evakuasi dan tempat titik kumpul serta penanggulangan bencana</p> <p>3. Melakukan edukasi terkait sistem pengelolaan dan pengelompokan sampah pada sistem wcp di sekolah - sekolah untuk mengedukasi generasi muda.</p>
--	--	---

4. Analisis Visi Pembangunan Smart City

4.1 Analisis Visi Pembangunan Daerah

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, Visi kepala daerah terpilih dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berlaku selama 5 (lima tahun).

Pada masa bakti 2017-2022, pembangunan Kabupaten Aceh Tengah sebagai bagian dari tahap III rencana jangka panjang 2007-2027 haruslah mengakomodasi berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan baik dalam konstelasi internasional, nasional, regional maupun regional, dengan tetap mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, prioritas program-program nasional dan kebijakan nasional meliputi pengembangan wilayah, kebijakan pembangunan lintas sektoral, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Aceh, Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 - 2022 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Damai, Sehat, Cerdas, Religius Dan Bermartabat Menuju
Masyarakat Aceh Tengah Adil Dan Sejahtera”

Visi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Aceh Tengah dalam masa lima tahun ke depan. Dimana, Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Dalam visi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 terdapat beberapa kata penting yaitu Damai, Sehat, Cerdas, Religius Bermartabat, Adil, dan Sejahtera. Agar tidak multi tafsir, maka berikut ini dijabarkan arti dari kata-kata tersebut.

Tabel 24. Penjelasan Visi Kabupaten Aceh Tengah

Damai	Bermakna terwujudnya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram dalam segala kondisi dan situasi;
Sehat	Bermakna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik sehingga memiliki daya saing yang tinggi;
Cerdas	Bermakna terwujudnya kondisi masyarakat yang memiliki pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi era globalisasi;
Religius	Bermakna terwujudnya kondisi masyarakat yang berkarakter/kesalehan sesuai dengan Syariah Islam;
Bermartabat	Bermakna kondisi masyarakat yang mempunyai harga diri yang menerapkan Syariat Islam yang kaffah dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat;
Adil	Bermakna terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan secara partisipatif, proporsional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi seluruh masyarakat;
Sejahtera	Bermakna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui pembangunan ekonomi produktif yang mengandalkan potensi unggulan lokal yang ramah lingkungan.

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Tengah

Agar pencapaian visi pembangunan jangka menengah ini dapat diwujudkan maka pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan 8 (delapan) misi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan penguraian secara ringkas upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan pemahaman dan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan

jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Adapun penjabaran daripada kedelapan misi tersebut adalah:

Tabel 25. Misi Kabupaten Aceh Tengah

MISI 1	Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.
MISI 2	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter.
MISI 3	Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang mandiri.
MISI 4	Mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan
MISI 5	Mewujudkan pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup
MISI 6	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
MISI 7	Mewujudkan kedamaian, kecerdasan spiritual dan keshalehan masyarakat
MISI 8	Mewujudkan ketahanan pangan

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Tengah

Untuk mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya kerangka yang jelas terkait dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh misi tersebut. Dimana, tujuan dan sasaran daripada setiap misi yang dijalankan tersebut, akan memberikan arah di dalam proses pelaksanaan di setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Adapun penjabaran dari tiap – tiap misi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Penjelasan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Aceh Tengah

MISI 1	Melalui misi 1 akan mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing	
	Tujuan 1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	Sasaran	Meningkatkan pendapatan masyarakat
		Meningkatkan investasi, Pendayagunaan potensi pariwisata dan pendapatan daerah
	Tujuan 2	Meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia yang berkarakter
	Sasaran	Meningkatkan kualitas pendidikan
		Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
		Meningkatkan prestasi generasi muda
MISI 2	Melalui misi 2 akan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.	
	Tujuan	Meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia yang berkarakter
	Sasaran 1	Meningkatkan kualitas pendidikan
	Sasaran 2	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

	Sasaran 3	Meningkatkan prestasi generasi muda
MISI 3	Melalui misi 3 akan mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang mandiri	
	Tujuan	Meningkatkan pembangunan ekonomi kampung
	Sasaran	Meningkatkan pengembangan kelembagaan kampung dan pemberdayaan masyarakat
MISI 4	Melalui misi 4 akan mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan	
	Tujuan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan
	Sasaran 1	Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar berbasis kawasan yang berkelanjutan
	Sasaran 2	Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang
MISI 5	Melalui misi 5 akan mewujudkan pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup	
	Tujuan	Meningkatkan pelestarian istiadat dan lingkungan hidup
	Sasaran 1	Meningkatkan pelestarian/pengembangan nilai kearifan lokal dan adat istiadat
	Sasaran 2	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

MISI 6	Melalui misi 6 diharapkan akan mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih	
	Tujuan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pembangunan partisipatif
	Sasaran 1	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan dan perluasan partisipasi public
	Sasaran 2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK
MISI 7	Melalui misi 7 diharapkan akan mewujudkan kedamaian, kecerdasan spiritual dan keshalehan masyarakat	
	Tujuan 1	Peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman agama Islam dalam kehidupan masyarakat
	Tujuan 2	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat
	Sasaran 1	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum
	Sasaran 2	Meningkatkan ketertiban kehidupan masyarakat yang kondusif
MISI 8	Melalui misi 8 akan mewujudkan ketahanan pangan	
	Tujuan	Peningkatan ketahanan pangan melalui penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan

Sasaran	Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal
----------------	--

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Tengah

Selanjutnya tema pembangunan yang dimiliki Kabupaten Aceh Tengah dalam kurun waktu 5 tahun ini (2018 – 2022) dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Tema Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah

TAHUN	TEMA PEMBANGUNAN
2018	Peningkatan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkarakter
2019	Pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi berkelanjutan yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
2020	Penuntasan pembangunan infrastruktur dasar untuk percepatan pembangunan kampung mandiri dan kampung cerdas (smart village)
2021	Mengoptimalkan pelayanan prima serta pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup
2022	Keberlanjutan pembangunan infrastruktur, SDM, adat istiadat dan lingkungan hidup serta pelayanan prima menuju Aceh Tengah yang damai, cerdas, religius dan bermartabat

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Tengah

Sedangkan arah kebijakan dimiliki Kabupaten Aceh Tengah dalam kurun waktu 5 tahun ini (2018 – 2022) dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Arah Kebijakan Kabupaten Aceh Tengah

ARAH KEBIJAKAN				
2018	2019	2020	2021	2022
Mendukung perekonomian masyarakat yang	Melanjutkan dukungan terhadap	Penuntasan pembangunan infrastruktur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang	Keberlanjutan peningkatan kualitas

ARAH KEBIJAKAN				
2018	2019	2020	2021	2022
mandiri dan berdaya saing serta meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	perekonomian masyarakat dan meningkatkan SDM berkualitas dan berkarakter serta pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan.	dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan dan percepatan pembangunan kampung yang mandiri	baik dan bersih serta memastikan tuntasnya pembangunan infrastruktur dasar, percepatan pembangunan kampung yang mandiri serta pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup.	perekonomian dan SDM yang berkualitas dan berkarakter, pelayanan prima serta pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup
Meningkatnya perekonomian masyarakat dicirikan peningkatan PDRB perkapita sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.	Tata kelola pemerintah yang Baik dan Bersih yang semakin baik dicirikan oleh birokrasi yang bersih dan akuntabel	Percepatan pembangunan kampung mandiri dan kampung cerdas sudah tercapai	Perilaku masyarakat dalam pelestarian istiadat dan lingkungan hidup semakin meningkat	

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Tengah

Pada bagian misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah juga memiliki keselarasan yang cukup erat dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) yang dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Keterkaitan Misi RPJM Kabupaten Aceh Tengah dengan RPJM Provinsi Aceh

MISI RPJM 2012 - 2022	MISI RPJMA 2017 – 2022
MISI 6	1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
MISI 7	2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.
MISI 7	3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.
MISI 2	4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat regional dan nasional.
MISI 2	5. Mewujudkan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial secara terintegrasi
MISI 8	6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
MISI 1	8. Membangun dan mengembangkan sentrasentra produksi dan industri kreatif yang kompetitif.
MISI 4	7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbaharukan
	9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip <i>evidence based planning</i> yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
	10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi.

Sejalan dengan dengan visi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, pengembangan *Smart City* di Kabupaten Aceh Tengah secara berkelanjutan juga tetap berpegang pada kerangka syariah Islam. Visi *Smart City* tersebut adalah dengan cara menggabungkan tujuan *Smart City* dengan kearifan lokal Kabupaten Aceh Tengah. Visi *Smart City* Kabupaten Aceh Tengah adalah:

“Terwujudnya Daerah Yang Berdaya Saing Dan Inovatif Didukung Sinergi Masyarakat Damai, Sehat, Cerdas, Religius Dan Bermartabat Menuju Masyarakat Aceh Tengah Adil Dan Sejahtera”.

Selanjutnya rumusan misi *Smart City* Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Rumusan misi Smart City Kabupaten Aceh Tengah

No.	MISI	DIMENSI
Misi 1	Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan, partisipatif dan komunikatif	<i>Smart Government</i>
Misi 2	Mewujudkan Aceh Tengah untuk berinovasi dengan menjadi pusat wisata alam yang cerdas dan berbudaya	<i>Smart Branding</i>
Misi 3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat	<i>Smart Economy</i>
Misi 4	Mewujudkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas untuk masyarakat yang sehat dan cerdas	<i>Smart Living</i>
Misi 5	Mewujudkan masyarakat saling kolaborasi untuk tetap berdaya saing damai	<i>Smart Society</i>
Misi 6	Mewujudkan daerah yang indah tetap sejuk serta berkelanjutan	<i>Smart Environment</i>

Selanjutnya kesesuaian antara Misi Smart City dengan Misi RPJMD Kabupaten Aceh Tengah yang dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Kesesuaian Misi Smart City Kabupaten Aceh Tengah Misi RPJMD Kabupaten Aceh Tengah

MISI SMART CITY		MISI RPJMD 2017-2022	
Misi 1	Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan, partisipatif dan komunikatif	Misi 6	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
Misi 2	Mewujudkan Aceh Tengah untuk berinovasi dengan menjadi pusat wisata alam yang cerdas dan berbudaya	Misi 3	Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang mandiri

MISI SMART CITY		MISI RPJMD 2017-2022	
Misi 3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat	Misi 1 Misi 8	Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing Mewujudkan ketahanan pangan
Misi 4	Mewujudkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas untuk masyarakat yang sehat dan cerdas	Misi 4	Mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan
Misi 5	Mewujudkan masyarakat saling kolaborasi untuk tetap berdaya saing damai	Misi 2 Misi 7	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter Mewujudkan kedamaian, kecerdasan spiritual dan keshalehan masyarakat
Misi 6	Mewujudkan daerah yang indah tetap sejuk serta berkelanjutan	Misi 5	Mewujudkan pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup

Setelah dilakukan penyesuaian Misi Smart City Kabupaten Aceh Tengah Misi RPJMD Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya perlu dilakukan pemetaan kebijakan untuk melihat sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Aceh Tengah dengan 6 (enam) pilar *Smart City* yaitu, *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment* seperti terlihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Sinkronisasi Strategi kebijakan RPJMD Kabupaten Aceh Tahun 2017 – 2022 dengan Dimensi Smart City

Misi	Strategi	Dimensi Smart City					
		Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
Misi 1	Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing						
	Peningkatan kontribusi sektor-sektor PDRB						
	Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan kampung.						
	Peningkatan keterampilan dan kesempatan berusaha masyarakat						
	Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan						
	Peningkatan kualitas dan instruktur BLK						
	Mempermudah dan mempercepat prosedur berusaha						
	Peningkatan promosi dan citra pariwisata						

Misi	Strategi	Dimensi Smart City					
		<i>Smart Governance</i>	<i>Smart Branding</i>	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Living</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart Environment</i>
	Peningkatan promosi dan kemudahan investasi						
Misi 2	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter						
	Meningkatkan Sistem Pendidikan dan kualitas pengelolaan perpustakaan.						
	Peningkatan kualitas, kuantitas dan distribusi guru secara proporsional						
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan						
	Peningkatan keterampilan generasi muda						
Misi 3	Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang mandiri.						
	Peningkatan kapasitas kader dan perangkat pembangunan kampung						
	Peningkatan kapasitas dan sistem manajemen						

Misi	Strategi	Dimensi Smart City					
		<i>Smart Governance</i>	<i>Smart Branding</i>	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Living</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart Environment</i>
	pemerintahan gampong berbasis teknologi informasi						
Misi 4	Mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan						
	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung ekonomi masyarakat						
	Peningkatan sarana dan prasarana jalan						
	Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan, permukiman dan kawasan secara berkelanjutan						
	Peningkatan pengawasan terhadap ketaatan pemanfaatan ruang						
Misi 5	Mewujudkan pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup						
	Peningkatan monitoring dan evaluasi kualitas air, udara dan tutupan lahan						

Misi	Strategi	Dimensi Smart City					
		<i>Smart Governance</i>	<i>Smart Branding</i>	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Living</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart Environment</i>
	Peningkatan sosialisasi norma-norma adat istiadat dalam masyarakat						
	Peningkatan kelestarian lingkungan melalui penerapan kearifan lokal						
Misi 6	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih						
	Peningkatan tata kelola dan manajemen aparatur pemerintah kabupaten						
	Peningkatan kualitas aparatur dan penyediaan informasi AKIP daerah						
	Peningkatan kualitas aparatur dan sistem dalam penyediaan kewajaran informasi keuangan daerah						
	Peningkatan kualitas pelayanan publik						
	Peningkatan akses infrastruktur, pemanfaatan, dan						

Misi	Strategi	Dimensi Smart City					
		<i>Smart Governance</i>	<i>Smart Branding</i>	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Living</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart Environment</i>
	keahlian TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah						
Misi 7	Mewujudkan kedamaian, kecerdasan spiritual dan kesalehan masyarakat						
	Peningkatan intensitas syiar dan penegakan hukum Islam di lingkungan masyarakat dan perkantoran						
	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum						
	Peningkatan kualitas aparatur dalam penegakan peraturan dan penanganan konflik sosial						
Misi 8	Mewujudkan ketahanan pangan						
	Peningkatan produksi dan produktivitas serta diversifikasi pangan untuk pemenuhan kecukupan energi pangan masyarakat						

Misi	Strategi	Dimensi Smart City					
		<i>Smart Governance</i>	<i>Smart Branding</i>	<i>Smart Economy</i>	<i>Smart Living</i>	<i>Smart Society</i>	<i>Smart Environment</i>
	Peningkatan lumbung pangan masyarakat, lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) pada setiap sentra produksi dan diversifikasi pangan.						

Tabel 33. Sinkronisasi Tujuan dan Indikator Kinerja Utama RPJMD dengan Dimensi Smart City

Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Dimensi Smart city					
			S m a r t G o v e r n a n c e	S m a r t B r a n d i n g	S m a r t E c o n o m y	S m a r t L i V i n g	S m a r t S o c i e t y	S m a r t E n v i r o n m e n t
Misi 1: Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.								
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pendapatan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi							
	Indeks Gini							
	Angka kemiskinan							
Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter								
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkarakter. Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia							
	Tingkat capaian SNP pendidikan dasar							
Misi 3: Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang mandiri								
Meningkatkan pembangunan ekonomi kampung	Meningkatkan daya saing produk unggulan kampung							
	Meningkatnya kampung Marwah							

Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan kelembagaan kampung dan pemberdayaan masyarakat	Persentase lembaga masyarakat yang aktif						
Misi 4: Mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan							
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan	Indeks pembangunan infrastruktur						
	Indeks aksesibilitas						
	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kawasan						
Misi 5: Mewujudkan pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup							
Meningkatkan pelestarian istiadat dan lingkungan hidup. Meningkatkan pelestarian/pengembangan nilai kearifan lokal dan adat istiadat.	Persentase pelestarian adat dan lingkungan hidup						
	Meningkatnya rasio rintisan kampung adat						
Misi 6: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih							
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pembangunan partisipatif	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi						
	Kategori Implementasi atas SAKIP						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						
Misi 7: Mewujudkan kedamaian, kecerdasan spiritual dan keshalehan masyarakat							
Peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman agama Islam dalam kehidupan masyarakat	Indeks pembangunan syariat Islam						
Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dlm kehidupan bermasyarakat	Indeks keshalehan sosial masyarakat						
Misi 8: Mewujudkan ketahanan pangan							
Peningkatan ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)						
	Persentase keben pegerni kampung (demapan)						
	Persentase ketersediaan pangan perkapita/tahun						

	Persentase Penanganan daerah rawan pangan						
	Persentase peningkatan Nilai/Skor Pola Pangan Harapan						

Tabel 34. Sinkronisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah dengan Pengembangan Smart City Kabupaten Aceh Tengah

MISI/VISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	DIMENSI
Visi : Terwujudnya Masyarakat Damai, Sehat, Cerdas, Religius Dan Bermartabat Menuju Masyarakat Aceh Tengah Adil Dan Sejahtera				
Misi 1: Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing				
1.1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1.1.1. Meningkatkan pendapatan masyarakat	1.1.1.1. Peningkatan kontribusi sektor-sektor PDRB	<i>Smart Economy</i>
			1.1.1.2. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan kampung.	
			1.1.1.3. Peningkatan ketrampilan dan kesempatan berusaha masyarakat	
			1.1.1.4. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan	
			1.1.1.5. Peningkatan kualitas dan instruktur BLK	
		1.1.2. Meningkatkan investasi, Pendayagunaan potensi pariwisata dan pendapatan daerah	1.1.2.1. Mempermudah dan mempercepat prosedur berusaha	
			1.1.2.2. Peningkatan promosi dan citra pariwisata	
			1.1.2.3. Peningkatan promosi dan kemudahan investasi	
2.1.	Meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia yang berkarakter	2.1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan	2.1.1.1. Meningkatkan Sistem Pendidikan dan kualitas pengelolaan perpustakaan.	
			2.1.1.2. Peningkatan kualitas, kuantitas dan distribusi guru secara proporsional	

MISI/VISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
		2.1.2.	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	2.1.2.1.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	
		2.1.3.	Meningkatkan prestasi generasi muda	2.1.3.1.	Peningkatan keterampilan generasi muda	
Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter						
2.1.	Meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia yang berkarakter	2.1.1.	Meningkatkan kualitas pendidikan	2.1.1.1.	Meningkatkan Sistem Pendidikan dan kualitas pengelolaan perpustakaan.	<i>Smart Society</i>
				2.1.1.2.	Peningkatan kualitas, kuantitas dan distribusi guru secara proporsional	
		2.1.2.	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	2.1.2.1.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	
		2.1.3.	Meningkatkan prestasi generasi muda	2.1.3.1.	Peningkatan keterampilan generasi muda	
Misi 3: Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang mandiri.						
3.1.	Meningkatkan pembangunan ekonomi kampung	3.1.1.	Meningkatkan pengembangan kelembagaan kampung dan pemberdayaan masyarakat	3.1.1.1.	Peningkatan kapasitas kader dan perangkat pembangunan kampung	<i>Smart Branding</i>
				3.1.1.2.	Peningkatan kapasitas dan sistem manajemen pemerintahan gampong berbasis teknologi informasi	
Misi 4: Mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan						

MISI/VISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
4.1.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan	4.1.1.	Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar berbasis kawasan yang berkelanjutan	4.1.1.1.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung ekonomi masyarakat	<i>Smart Living</i>
				4.1.1.2.	Peningkatan sarana dan prasarana jalan	
				4.1.1.3.	Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan, permukiman dan kawasan secara berkelanjutan	
		4.1.2.	Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang	4.1.2.1.	Peningkatan pengawasan terhadap ketaatan pemanfaatan ruang	
Misi 5: Mewujudkan pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup						
5.1.	Meningkatkan pelestarian istiadat dan lingkungan hidup	5.1.1.	Meningkatkan pelestarian/pengembangan nilai kearifan lokal dan adat istiadat	5.1.2.1.	Peningkatan monitoring dan evaluasi kualitas air, udara dan tutupan lahan	<i>Smart Environment</i>
				5.1.2.2.	Peningkatan sosialisasi norma-norma adat istiadat dalam masyarakat	
		5.1.2.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	5.1.1.1.	Peningkatan kelestarian lingkungan melalui penerapan kearifan lokal	
Misi 6: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih						
6.1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	6.1.1.	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan dan perluasan partisipasi publik	6.1.1.1.	Peningkatan tatakelola dan manajemen aparatur pemerintah kabupaten	<i>Smart Government</i>

MISI/VISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
	serta pembangunan partisipatif					
				6.1.1.2.	Peningkatan kualitas aparatur dan penyediaan informasi AKIP daerah	
				6.1.1.3.	Peningkatan kualitas aparatur dan sistem dalam penyediaan kewajaran informasi keuangan daerah	
				6.1.1.4.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	
		6.1.2.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK	6.1.2.1.	Peningkatan akses infrastruktur, pemanfaatan, dan keahlian TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	
Misi 7: Mewujudkan kedamaian, kecerdasan spiritual dan keshalehan masyarakat						
7.1.	Peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman agama Islam dalam kehidupan masyarakat	7.1.1.	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dlm kehidupan bermasyarakat	7.1.1.	Peningkatan intensitas syiar dan penegakan hukum Islam di lingkungan masyarakat dan perkantoran	<i>Smart Society</i>
7.2.	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum	7.2.1.	Meningkatkan ketertiban kehidupan masyarakat yang kondusif	7.2.1.	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum	
				7.2.2.	Peningkatan kualitas aparatur dalam penegakan peraturan dan penanganan konflik sosial	
Misi 8: Mewujudkan ketahanan pangan						

MISI/VISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		DIMENSI
8.1.	Peningkatan ketahanan pangan melalui penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan	8.1.1.	Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	8.1.1.1.	Peningkatan produksi dan produktivitas serta diversifikasi pangan untuk pemenuhan kecukupan energi pangan masyarakat	<i>Smart Economy</i>
				8.1.1.2.	Peningkatan lumbung pangan masyarakat, lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) pada setiap sentra produksi dan diversifikasi pangan.	

4.2 Sasaran *Smart City* Kabupaten Aceh Tengah

4.2.1 Smart Governance

Pada dimensi *Smart Governance*, sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Sasaran *Smart City* Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan sub pilar dimensi *Smart Governance* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 35. Strategi Pembangunan Smart Governance

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Public Service</i>	Layanan publik yang terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi layanan terutama <i>government to citizen</i> dan <i>government to business</i> serta juga <i>government to government</i> dan <i>government to employee</i> untuk meningkatkan kinerja ASN serta menuju ke Satu Data 2. Pengembangan aplikasi publik yang <i>user friendly</i> 3. Penerapan layanan dokumentasi dan informasi hukum 4. Penerapan layanan yang memenuhi Standar Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
	Indeks kepuasan masyarakat dan dunia bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas layanan publik 2. Penerapan layanan pengaduan publik 3. Pembangunan Mal Pelayanan terpadu satu atap yang melibatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan <i>stakeholder</i>
<i>Bureaucracy</i>	Indeks SPBE	Penerapan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Aceh Tengah
	Peningkatan kinerja ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan secara menyeluruh tunjangan kinerja yang didukung dengan sistem e-kinerja 2. Pengoptimalan kinerja pengawasan internal
<i>Public Policy</i>	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrembang 2. Mengkampanyekan cara bersosial media secara cerdas, sehat, anti diskriminasi dan bertanggung jawab

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
	Meningkatkan masyarakat yang menggunakan layanan	Pelaksanaan publikasi/promosi yang selalu update terhadap layanan-layanan publik yang ada

4.2.2 *Smart Branding*

Pada dimensi *Smart Branding*, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah Kabupaten dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran *Smart City* Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan sub pilar dimensi *Smart Branding* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 36. Strategi Pembangunan Smart Branding

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Tourism</i>	Berkembangnya Ekosistem Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan perawatan infrastruktur pendukung budaya, wisata islami dan kebencanaan 2. Pengembangan informasi wisata digital 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata 4. Pengembangan strategi pemasaran baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional 5. Mendorong masyarakat untuk kreatif di bidang ekonomi dan pariwisata 6. Mendorong masyarakat untuk mengangkat potensi wilayahnya yang dapat memberikan dampak perekonomian

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Business</i>	Berkembangnya Ekonomi Kreatif Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Dashboard <i>E-Commerce</i> yang terintegrasi dengan <i>Aceh Tengah Command Center</i> (ATCC) 2. Mendorong semangat wirausaha melalui organisasi kepemudaan, komunitas pemuda dan pelajar 3. Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan 4. Pengembangan kawasan wisata kuliner yang kaya rasa, kaya menu, nyaman dan aman
<i>Appearance</i>	Terciptanya Wajah Kota Dengan Tata Ruang Yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan taman kota yang nyaman, aman dan layak bagi anak, pemuda dan lansia. 2. Peningkatan layanan publik <i>wifi</i> yang mengedukasi user 3. Pembuatan papan informasi nilai sejarah pada bangunan-bangunan kota pusaka 4. Pengembangan pola navigasi wisata digital

4.2.3 *Smart Economy*

Pada dimensi *Smart Economy*, sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran *Smart City* Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan sub pilar dimensi *Smart Economy* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 37. Strategi Pembangunan Smart Economy

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Industry</i>	Terciptanya ekosistem industri pendukung <i>Smart City</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun ekonomi industri yang berdaya saing dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan daerah dan pengembangan usaha mikro. 2. Membangun dan mengembangkan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan, sebagai pendukung <i>Smart City</i>. 3. Meningkatkan iklim investasi.
<i>Welfare</i>	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pengembangan dan Peningkatan kualitas daripada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
<i>Transaction</i>	Penguatan tatanan ekonomi Syariah di dalam ekosistem pelayanan, pengelolaan dan transaksi keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan kelompok usaha dan koperasi Syariah. 2. Peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan daerah.

4.2.4 Smart Living

Pada dimensi *Smart Living*, sasaran yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Sasaran *Smart City* Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan sub pilar dimensi *Smart Living* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 38. Strategi Pembangunan Smart Living

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Harmony</i>	Terkendalinya Tata Ruang Kabupaten Aceh Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. 2. Pengembangan rencana kawasan di masa depan dengan desain terpadu dan berwawasan lingkungan. 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak
<i>Health</i>	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan program yang mengarah pada perbaikan kesehatan masyarakat 2. Pengembangan sistem Pelayanan kesehatan terpadu dari puskesmas, bidan, rumah sakit dan dokter praktek yang terintegrasi dan ramah anak. 3. <i>Total Quality Management (TQM)</i> dan <i>Quality Assurance</i> pelayanan kesehatan
<i>Mobility</i>	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum, Prasarana dan Sarana Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik 2. Pengembangan sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan transportasi <i>non-motorized</i> 3. Menerapkan kebijakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jam puncak di pusat kota dan pinggiran kota.

4.2.5 Smart Society

Pada dimensi *Smart Society*, sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran *Smart City* Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan sub pilar dimensi *Smart Society* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 39. Strategi Pembangunan Smart Society

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Community</i>	Meningkatnya Interaksi Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran serta kepemudaan, komunitas dan perempuan dalam kegiatan sosial. 2. Pelaksanaan kerja sama dengan institusi pendidikan dan akademisi terkait dengan pengabdian masyarakat 3. Penguatan lembaga masjid/Meunasah 4. Pemenuhan kebutuhan kaum difabel 5. Peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 6. Pelatihan usaha- usaha kreatif kepada masyarakat dan bekerja sama dengan melibatkan <i>stakeholder</i> 7. Pembangunan/pengembangan sarana/prasarana ibadah di perkantoran dan pasar
<i>Learning</i>	Meningkatnya Literasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan program yang mengarah kepada Pengembangan metodologi <i>e-learning</i> bagi anak usia dini, SD, SMP dan SMA 2. Peningkatan kesadaran pemanfaatan internet secara positif dan produktif serta penguatan sosialisasi qanun dan penyuluhan agama islam menggunakan pendekatan TIK 3. Penguatan peran pemuda sebagai duta baca di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing
<i>Security</i>	Meningkatnya Layanan Mitigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan pengembangan Gampong siaga bencana 2. Penguatan komunitas berbasis <i>security</i> dalam menghadapi ancaman-ancaman terkait keamanan data 3. Peningkatan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana 4. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebencanaan 5. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kedaruratan yang efisien, efektif dan responsif

4.2.6 Smart Environment

Pada dimensi *Smart Environment*, sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. Sasaran *Smart City* Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan sub pilar *Smart Environment* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 40. Strategi Pembangunan Smart Environment

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Protection</i>	Meningkatnya Proteksi Terhadap Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang cukup dan berkualitas sesuai arahan Rencana Tata Ruang. 2. Memelihara, mengelola dan mengoptimalkan RTH publik agar fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan estetisnya tetap terjaga. 3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai sistem penyangga kehidupan
<i>Waste</i>	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R 2. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (3R) 3. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian dan perdagangan. 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan. 5. Mendorong masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi melalui pendekatan <i>circular economy</i> 6. Meningkatkan ketersediaan septic tank komunal pada daerah kumuh dan daerah terindikasi
<i>Energy</i>	Terciptanya Tata Kelola Energi Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan penggunaan tenaga surya pada sarana umum Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kedaruratan yang efisien, efektif dan responsif